

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KECENDERUNGAN PEGAWAI MELAKUKAN
KECURANGAN/*FRAUD* PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
(Studi Kasus pada Pemerintahan di Kabupaten Klaten)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : M. Hildan Zaka Firdaus

No.Mahasiswa : 14312410

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

2018

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KECENDERUNGAN PEGAWAI MELAKUKAN KECURANGAN/*FRAUD*
PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
(Studi Kasus pada Pemerintahan di Kabupaten Klaten)**

SKRIPSI

Disusun dan ditujukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : M.Hildan Zaka Firdaus

No.Mahasiswa : 14312410

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 06 Juni 2018

Penulis,



(M.Hildan Zaka Firdaus)

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
KECENDERUNGAN PEGAWAI MELAKUKAN KECURANGAN/*FRAUD*
PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
(Studi Kasus pada Pemerintahan di Kabupaten Klaten)**

SKRIPSI

Di Ajukan Oleh:

Nama: M. Hildan Zaka Firdaus

No.Mahasiswa: 14312410

Telah di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 25/6 2018

Dosen Pembimbing



(Ataina Hudayati,Dra.,M.Si.,Ph.D.,Ak.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN PEGAWAI
MELAKUKAN KECURANGAN/ FRAUD PADA SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI
KASUS PADA DINAS PEMERINTAHAN KLATEN)**

Disusun Oleh : **M.HILDAN ZAKA FIRDAUS**

Nomor Mahasiswa : **14312410**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 26 Juli 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Ataina Hidayati, Dra., Ak., M.Si.,Ph.D.



Penguji : Primanita Setyono, Dra., MBA, Ak, Cert. SAP.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

“THE FUTURE MUST BE BETTER THAN TODAY”

“Berjuanglah sampai akhir, apapun hasilnya nanti, jadilah orang yang mampu bertahan hingga pertandingan usai.” (Daud Antonius)

*“Aku tersenyum, bukan berarti hidupku telah sempurna, tetapi itu hanya caraku bersyukur untuk menikmati hidup.”
(Monkey D.Luffy – One Piece)*

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan.”

(Qs. Ar-Rahman (55): 13)

“Jangan menyebarkan ilmu dengan tujuan agar orang lain membenarkanmu. Namun sebarkanlah ilmu dengan tujuan agar Allah SWT membenarkanmu.” (Habib Lutfhi Bin Yahya)

“Masalah di dunia ini terjadi saat orang bodoh terlalu yakin dan orang pintar penuh keraguan.” - Bertrand Russell -

*“Membaca membuatku lebih kreatif.
Membaca mengasah imajinasiku dan memberikan saat-saat tenang kepadaku.”
- Rey Misterio -*

“Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan diantaramu beberapa tingkat lebih tinggi.” (Qs. Al-Mujadilla : 11)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju pada zaman yang terang benerang seperti saat ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan/*Fraud* pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas Pemerintahan Kab. Klaten).”

Skripsi ini disusun sebagai wujud nyata untuk memenuhi impian penulis dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi untuk mencapai dearajat Sarjana Strata-1 pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak doa, bantuan, bimbingan, dukungan, serta nasihat dari berbagai pihak, sehingga skripsi atau tugas akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi doa, bantuan, bimbingan, dukungan, serta nasihat demi terselesainya skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ibu Sri Hardati selaku Ibu penulis yang senantiasa memberikan kekuatan, dukungan, doa, kasih sayang kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih kepada Bapak Marsidik selaku Bapak penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. Semoga kalian diberikan kesehatan, umur panjang, dan kesempatan untuk bisa melihat penulis menjadi orang yang sukses. Aamiin.
3. M.Riza Fahlaffi selaku kakak penulis yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih kepada Ronna Shinta Kirana selaku adik penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama proses pembuatan tugas akhir ini.
4. Ibu Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ph.D., Ak. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih banyak atas bantuan Ibu selama ini karena telah memberikan ilmu, dukungan, bantuan, kemudahan, dan selalu memberikan solusi kepada penulis ketika penulis sedang mengalami kesulitan dalam pembuatan tugas akhir. Semoga Ibu Ataina selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan.
5. Bapak Nandang Sutrisno S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com selaku Kepala Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Indonesia.

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi UII yang telah memberikan ilmu dan nasihat serta masukan yang berarti sehingga penulis bisa seperti sekarang.
8. Untuk para sahabatku, Miftahuddin, M. Hammam, Alvina P, Imam Teguh, Titi Aditiawati dan Dimas Panji yang selalu memberi dukungan, motivasi, dan selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah penulis selama proses pembuatan tugas akhir.
9. Terimakasih kepada Ovin Liliana Putri dan Adetya Rachmasari sudah menjadi mentor penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Berkat kalian tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Teman-teman Kos Leles (Bagus R, Arsyad, Bayu K, Ilham W, Sarkawi, Dimas, Alvian, Arga, Ali, Mekong) yang selalu mendukung dan menemani penulis selama proses pembuatan tugas akhir ini.
11. Terimakasih kepada M. Faizal Reyzaldi selaku saudara penulis yang dari awal masuk kuliah sampai sekarang masih betah sekamar dengan penulis dan selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Terimakasih untuk indomie goreng rasa rendang yang selalu ada untuk penulis ketika penulis merasa kelaparan karena memikirkan tugas akhir.
13. Terimakasih kepada semua teman-teman dekat penulis yang telah memberikan canda tawa, terimakasih juga sudah menemani penulis selama kurang lebih 4 tahun ini sehingga membuat penulis merasa senang selama berada di Yogyakarta.

14. Kepada teman-teman jajaran KOPMA FE, kepanitiaan dan organisasi yang telah memberikan moment dan pengalaman yang tak terlupakan oleh penulis.
15. Terimakasih juga kepada teman-teman baru penulis (Amanu, Satria, Satrio, Kanz Anjasmara, Pramesti, Asty, Pelangi) selaku teman-teman KKN serta seluruh warga dusun Pete, Kanigoro, Ngablak, Magelang yang telah memberikan kehidupan baru yang membuat penulis merasa dapat lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Terimakasih atas doa dan dukungan kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan pihak berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 7 Juni 2018

Penulis,

(M. Hildan Zaka Firdaus)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN BERITA ACARA	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Kerangka Teori	11
2.1.1 <i>Fraud Triangle Theory</i>	11
2.1.2 Teori Keagenan	13
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Fraud	14
2.2.2 Asimetri Informasi	17
2.2.3 Penegakan Hukum	18
2.2.4 Kesesuaian Kompensasi	19
2.2.5 Moralitas Individu	22
2.3 Penelitian Terdahulu	22

2.4	Hipotesis Penelitian	25
2.4.1	Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan/ <i>Fraud</i>	25
2.4.2	Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan/ <i>Fraud</i>	26
2.4.3	Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan/ <i>Fraud</i>	27
2.4.4	Pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan/ <i>Fraud</i>	28
2.5	Gambar Kerangka Konseptual.....	29
BAB III METODE PENELITIAN		30
3.1	Populasi dan Penentuan Sampel Penelitian	30
3.2	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.3	Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	32
3.3.1	Variabel Dependen.....	32
3.3.2	Variabel Independen	33
3.4	Metode Analisis Data.....	38
3.4.1	Statistik Deskriptif	38
3.4.2	Uji Kualitas Data.....	38
3.4.3	Uji Asumsi Klasik	39
3.4.4	Analisis Regresi	40
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Hasil Pengumpulan Data	43
4.2	Karakteristik Responden.....	45
4.2.1	Jenis Kelamin	45
4.2.2	Usia Responden.....	45
4.2.3	Tingkat Pendidikan.....	46
4.2.4	Masa Kerja.....	47
4.3	Statistik Deskriptif	48
4.4	Uji Kualitas Data	51
4.4.1	Uji Validitas.....	51

4.4.2	Uji Reliabilitas.....	53
4.5	Uji Asumsi Klasik.....	53
4.5.1	Uji Multikolinieritas	54
4.5.2	Uji Heteroskedastisitas	54
4.5.3	Uji Normalitas	55
4.6	Analisis Regresi Linier Berganda	57
4.6.1	Uji Koefisien Determinan.....	58
4.6.2	Uji F.....	59
4.6.3	Uji t.....	60
4.7	Pembahasan	62
4.7.1	Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan <i>Fraud</i>	62
4.7.2	Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Kecenderungan <i>Fraud</i>	63
4.7.3	Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan <i>Fraud</i>	65
4.7.4	Pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecendrungan <i>Fraud</i>	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	70
5.3	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....		72
LAMPIRAN		75

DAFTAR TABEL

3.1	Tabel Dinas yang di Jadikan Sampel.....	31
4.1	Tabel Distribusi Penyebaran Kuisisioner	43
4.2	Tabel Hasil Pengumpulan Data Kuisisioner	44
4.3	Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
4.4	Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	46
4.5	Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
4.6	Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Jabatan	47
4.7	Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif	48
4.8	Tabel Hasil Uji Validitas	51
4.9	Tabel Hasil Uji Reliabilitas	53
4.10	Tabel Hasil Uji Multikolinearitas	54
4.11	Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas	55
4.12	Tabel Hasil Uji Normalitas	56
4.13	Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda	57
4.14	Tabel Hasil Uji Koefisien Determinan	58
4.15	Tabel Hasil Uji F	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	29
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Kuisisioner
Lampiran 2	: Rekap Data
Lampiran 3	: Hasil Uji Statistik Deskriptif
Lampiran 4	: Hasil Uji Validitas
Lampiran 5	: Hasil Uji Reliabilitas
Lampiran 6	: Hasil Uji Normalitas
Lampiran 7	: Hasil Uji Multikolinearitas
Lampiran 8	: Hasil Uji Heteroskedastisitas
Lampiran 9	: Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan (fraud). Penelitian ini menggunakan responden penelitian pegawai negeri sipil yang bekerja pada dinas Kabupaten Klaten. Dari 150 kuesioner yang disebar keseluruh calon responden, hanya terdapat 129 kuesioner yang dapat dianalisis untuk pengujian hipotesis. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah asimetri informasi, penegakan hukum/peraturan, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu sebagai variabel independen dan kecenderungan kecurangan sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud), penegakan hukum/peraturan dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (fraud), dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud).

Kata kunci : Asimetri informasi, penegakan hukum/peraturan, kesesuaian kompensasi, moralitas individu, dan kecenderungan kecurangan (fraud).

ABSTRACT

The goal of this study to analyze the factors of employee do cheating tendencies (fraud). This study uses survey respondents civil servants working in the District Klaten Central Java. From 150 questionnaires distributed to all potential respondent, there were 129 questionnaires that can be analyzed to test the hypothesis. The variables that use in the study are asymmetry information, distributive justice, conformity of compensation, and individual morality as independent variable and tendency of cheating as dependent variable. This study used multiple linier regression analysis to test the hypothesis. The result of this study demonstrate that information asymmetry has a positive effect on the tendency of cheating, distributive justice and conformity of compensation have no effect to tendency of cheating, and individual morality has negative effect to tendency of cheating.

Keywords : Asymmetry information, distributive justice, conformity of compensation, individual morality, and tendency of cheating (fraud).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, perkembangan dunia akuntansi sudah sangat pesat. Kemajuan akuntansi di era ini selain membawa manfaat bagi masyarakat, juga bisa menjadi sumber masalah kecurangan (*fraud*) yang sangat kompleks. Seperti yang di sampaikan oleh (Mulia, Febrianto, & Kartika, 2017) bahwa masalah kecurangan yang bisa saja timbul adalah masalah korupsi, manipulasi laporan keuangan, atau penyalahgunaan asset. Keadaan di Indonesia sendiri *fraud* hampir terdapat di setiap lini organisasi, mulai dari jajaran manajemen/pimpinan puncak sampai kepada jajaran pelaksana. Menurut (Lanham et al, 1987) dalam Maula, K (2017) *fraud* dapat diartikan sebagai berbagai bentuk kecurangan, antara lain penipuan yang disengaja, pengambilan aset kantor, pemalsuan rekening, penyelewengan, dan lain-lain.

Menurut (Adinda, 2015) kecurangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok secara sengaja untuk memperoleh keuntungan. Hal semacam ini bisa saja berdampak pada laporan keuangan maupun kinerja organisasi dan dapat mengakibatkan kerugian bagi entitas atau pihak lain. Pada tingkat pemerintah daerah korupsi dapat dilihat dari sisi suap menyuap, pemberian perlindungan, pencurian barang publik untuk kepentingan pribadi, dan bahkan sampai penggelapan uang. Menurut (Urbah D.N, 2017) dalam penelitiannya

menyatakan bahwa *fraud* merupakan tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam pembuatan laporan keuangan, atau suatu tindakan yang dengan sengaja untuk menggunakan sumberdaya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Sekarang ini yang namanya kecurangan / *fraud* sudah menjadi momok di kalangan pemerintahan. Singleton dan Singleton (2010) dalam Mulia, Febrianto, & Kartika (2017) menyatakan kecurangan adalah suatu kejahatan, dimana kecurangan merupakan istilah umum yang mencakup berbagai kelihaiian manusia dimana satu individu mengambil keuntungan dari yang lain melalui gambaran yang salah. Terdapat dua jenis kejahatan, yakni:

(1) Kecurangan sebagai suatu kejahatan. Kecurangan merupakan istilah umum yang mencakup berbagai kelihaiian manusia dimana satu individu mengambil keuntungan dari yang lain melalui gambaran yang salah.

(2) Kecurangan sebagai suatu kesalahan. Kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dalam memberikan laporan tentang fakta-fakta material yang salah, tindakan tersebut dilakukan supaya orang yang berkepentingan salah dalam mengambil keputusan, karena menganggap fakta-fakta tersebut benar.

Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik, seperti instansi pemerintahan, yang pelakunya merupakan pegawai pihak dalam maupun di luar organisasi. *Fraud* lebih banyak terjadi pada instansi pemerintah disebabkan karena organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks,

sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, dan tekanan yang tinggi.

Perilaku korupsi di Indonesia sendiri sekarang ini benar-benar sistemik, bahkan korupsi yang terjadi sudah berubah menjadi vampir state karena hampir semua infra dan supra struktural politik dan sistem ketatanegaraan sudah terkena penyakit korupsi. (Syahrina, Irianto, & Prihatiningtyas, 2017) pernah menyatakan dalam penelitiannya bahwa berbagai cara yang dilakukan untuk menangani kasus kasus yang merugikan negara ini telah dilakukan pemerintah melalui keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Upaya pencegahan pun juga telah dilakukan demi meminimalisir adanya kecurangan dengan diwajibkannya setiap instansi pemerintah untuk memiliki tim SPI dan dibangunnya berbagai sistem elektronik yang berguna untuk menunjang proses transparansi dan akuntabilitas penyelenggara kegiatan pemerintah, serta pembayaran tunjangan kinerja yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan dan membangkitkan gairah bekerja para pegawai pemerintah. Upaya yang lain adalah dengan mewajibkan semua aparat publik, khususnya pejabat publik dan pejabat perbendaharaan untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki. Namun sayangnya hasil yang di dapat masih belum sesuai dengan harapan, di mana Indonesia masih memiliki predikat negara terkorup di dunia.

Menurut Transparency International berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) dalam Syahriani Usman, (2017) mengenai hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara, Indonesia berada pada peringkat ke-90. Di Indonesia sendiri yang menjadi momok kecurangan atau yang sering melakukan kecurangan justru terjadi di kalangan birokrasi, DPRD, dan kepala daerah. Bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi sekedar manipulasi uang transportasi, hotel, dan uang saku, tetapi sudah masuk pada tender proyek fiktif, pemasaran, mark up pengadaan barang hingga penggelapan pajak.

Pemerintahan yang sudah diberikan kepercayaan penuh dari masyarakat seharusnya berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Salah satunya adalah memastikan bahwa keuangan negara itu terkelola dengan baik dan *accountable*. Namun faktanya masih banyak sekali praktik atau kasus *fraud* yang dilakukan oleh oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam pemerintahan yang secara langsung dapat merugikan keuangan negara maupun merugikan masyarakat. Akhir-akhir ini banyak ditemukan adanya praktik-praktik *fraud* terutama korupsi di sektor pemerintahan. Hal ini menunjukkan betapa masih maraknya *fraud* di setiap level pemerintahan.

Khususnya di kabupaten Klaten, telah banyak penelitian sebelumnya yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi kecurangan, baik di sektor swasta maupun pemerintah. Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidaksamaan hasil dari beberapa penelitian terdahulu dan diperlukan pemahaman yang lebih baik

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pegawai melakukan tindak kecurangan (*fraud*), khususnya pada sektor pemerintahan. Selain itu, hal yang mendasari dilakukannya penelitian ini karena isu mengenai kasus korupsi di Kabupaten Klaten masih banyak terjadi dan tidak sedikit dari kasus tersebut sampai sekarang masih belum terselesaikan atau masih mengambang.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kecenderungan pegawai melakukan kecurangan, diantaranya seperti yang dilakukan oleh (Adi, Ardiyani, & Ardianingsih, 2016) menyatakan bahwa Asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan di sektor pemerintahan. Asimetri informasi merupakan keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan informasi yang diperoleh pihak principal dan agent. Kondisi tersebut menyebabkan terbukanya peluang bagi pegawai untuk memberikan atau menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal itu dilakukan pegawai untuk mendapatkan penilaian yang baik atas kinerjanya dengan melakukan berbagai cara meskipun cara yang dilakukan itu termasuk cara yang curang.

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi pegawai melakukan fraud adalah penegakan hukum, menurut (Usman, 2017) bahwa penegakan hukum berpengaruh signifikan terhadap kecurangan di sektor pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kokoh penegakan hukum dalam suatu instansi, maka kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang terjadi juga akan semakin rendah. Faktor lain yang

mempengaruhi pegawai melakukan sebuah kecurangan/*fraud* adalah moralitas individu. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh (Aranta, 2013) menyatakan bahwa moralitas aparat berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan melakukan sebuah kecurangan/*fraud*. Salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang terdapat pada individu seseorang atau moralitas individu adalah *Greed* (keserakahan). Dengan adanya perilaku serakah ini orang tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang sudah di perolehnya. Orang itu akan mencari apa yang di inginkan terus menerus meskipun menggunakan cara yang salah. Jadi pada intinya semakin tinggi moralitas individu seseorang maka akan semakin kecil kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan kecurangan adalah kesesuaian kompensasi menurut Dewi (2017) kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompensasi yang diterima pegawai, maka akan menurunkan tingkat kecurangan dalam instansi pemerintahan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi (*fraud*), maka penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai di instansi sektor pemerintahan di Kabupaten Klaten. Sehingga penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan obyek yang berbeda. Faktor faktor ini terdiri dari asimetri informasi , penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka masalah penelitian ini yaitu :

1. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai melakukan *fraud*?
2. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai melakukan *fraud*?
3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai melakukan *fraud*?
4. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai melakukan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh Asimetri Informasi terhadap kecenderungan pegawai melakukan *fraud*.
2. Menganalisis pengaruh Penegakan Hukum terhadap kecenderungan pegawai melakukan *fraud*.
3. Menganalisis pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap kecenderungan pegawai melakukan *fraud*.

4. Menganalisis pengaruh Moralitas Individu terhadap kecenderungan pegawai melakukan *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang di dapat selama perkuliahan dan para mahasiswa yang akan berkarir dalam bidang akuntansi lebih sadar terhadap berbagai skandal yang terjadi di bidang akuntansi sehingga dapat menghindari terjadinya krisis profesional.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Bagi peneliti

Dapat memperluas pengetahuan di bidang audit khususnya mengenai kecurangan yang terjadi di dalam lingkungan instansi pemerintahan. Manfaat lain yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu peneliti belajar bagaimana melakukan penelitian dengan baik, terstruktur dan relevan.

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rekomendasi dalam membuat kebijakan-kebijakan upaya mencegah terjadinya fraud di sektor pemerintahan dengan menekan penyebab terjadinya fraud tersebut.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang *fraud goverment*. Sekaligus bisa digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan topik sejenis di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang dibagi menjadi dalam lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil pengolahan data yang telah dilakukan, pengujian hipotesis dan dilanjutkan dengan menguraikan temuan-temuan dalam analisis data serta menguraikan temuan tersebut.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penutup dan bagian akhir dari suatu penelitian yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 *Fraud Triangle Theory*

Penelitian ini menggunakan teori *Fraud Triangle* sebagai dasar teori utama. Berdasarkan teori ini ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Ketiga faktor tersebut sering disebut dengan istilah segitiga kecurangan yang terdiri dari *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Dalam Tuanakotta (2007:105) menjelaskan bahwa Fraud Triangle adalah model untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan pekerjaan termasuk korupsi. Konsep segitiga kecurangan ini pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey (1953). Cressey dalam Tuanakotta (2007:105) menyimpulkan bahwa kecurangan secara umum mempunyai tiga sifat dalam teori ini yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

2.1.1.1 *Pressure*

Tekanan adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Bentuk tekanan yang nyata disebabkan oleh kondisi kehidupan nyata yang dihadapi oleh pelaku dan mendorong untuk melakukan sebuah kecurangan. Kondisi tersebut bisa berupa kebiasaan sering berjudi,

memakai obat terlarang, atau menghadapi persoalan keuangan. Tekanan dalam bentuk persepsi merupakan opini yang dibangun oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan seperti misalnya mengubah jumlah nominal dalam laporan keuangan atau korupsi.

2.1.1.2 *Oppoturnity*

Menurut (Pravitasari, 2016) kesempatan adalah situasi yang membuka peluang bagi manajemen atau pegawai yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Atau bisa di bilang bahwa kesempatan adalah peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya. Para pelaku kecurangan percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Kemungkinan peluang akan timbul karena pengendalian internalnya lemah, penegakan peraturan yang buruk, pengawasan yang kurang baik atau melalui penggunaan posisi jabatan. Tuanakotta (2007:106) dalam bukunya menjelaskan penelitian Cressey yang menyatakan bahwa pelaku kecurangan selalu memiliki pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut agar tindakan itu tidak dapat terdeteksi.

2.1.1.3 *Rationalization*

(Pravitasari, 2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa rasionalisasi merupakan sikap karakter atau serangkaian nilai nilai etis yang memperbolehkan manajemen atau pegawai melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur. Rasionalisasi merupakan elemen penting dalam

terjadinya kecurangan. Sikap dimana pelaku menganggap apa yang dia lakukan itu benar. Atau menganggap kesalahan itu bukan merupakan kecurangan.

2.1.2 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) dalam (Dewi, 2016) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu orang atau lebih yang bertindak sebagai principal (yaitu pemegang saham) yang menunjuk orang lain sebagai agen (yaitu manajer) supaya memberikan jasa untuk kepentingan prinsipal termasuk mendelegasikan kekuasaan dalam pembuatan keputusan. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*).

Bentuk pengelolaan keuangan Negara saat ini sudah sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*) yang menciptakan hubungan keagenan. Disini pemerintah dapat diartikan sebagai agen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai prinsipalnya. Mereka memiliki hubungan yang tak terpisahkan layaknya perangkong dengan surat. Disisi lain, terdapat ketidakseimbangan wewenang mengenai informasi. DPRD tidak memiliki informasi secara penuh tentang laporan pertanggungjawaban eksekutif atas pengelolaan anggaran, apakah pengelolaan anggaran sudah sesuai dengan kondisi sesungguhnya atau belum, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menerapkan sistem pengendalian

internal yang memadai, dan telah melakukan pengungkapan secara penuh atas pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tersebut.

Menurut Nurharjanti (2017) apabila agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal serta agen dan principal memiliki kepentingan yang berbeda dengan agen, maka akan terjadi masalah prinsipal-agen, agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal. Hubungan prinsipal-agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain. Pengaruh ini diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Fraud

Definisi *fraud* menurut *Black Law Dictionary* dalam (Suryana & Sadeli, 2015) adalah kesenjangan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat menyebabkan orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan itu merupakan suatu kejahatan. Penyajian yang salah/keliru (dalam pernyataan) yang secara ceroboh tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya akan berakibat menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau

penyajian yang salah (salah pernyataan), menyembunyikan fakta material, atau penyajian yang ceroboh tanpa perhitungan yang menyebabkan orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *internal fraud* (tindakan penyelewengan di dalam perusahaan atau institusi) dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu: *fraud* terhadap aset, *fraud* terhadap laporan keuangan, dan korupsi.

2.2.1.1 *Fraud Terhadap Aset (Aset Misappropriation)*

Kecurangan terhadap aset adalah penyalahgunaan aset perusahaan (institusi), entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari perusahaan. Aset perusahaan dapat berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas. Sehingga, aset misappropriation dikelompokkan menjadi dua macam:

- a. *Cash Misappropriation*. Penyelewengan terhadap aset yang berupa kas (Misalnya: pengeluaran kas, menyalahgunakan cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor)
- b. *Non Cash Misappropriation*. Penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas (misalnya: menggunakan fasilitas perusahaan untuk pribadi)

2.2.1.2 *Fraud terhadap Laporan Keuangan (Fraudulent Statements)*

ACFE telah membagi jenis *fraud* ini menjadi dua macam, yaitu financial dan non financial. Semua tindakan yang membuat laporan keuangan menjadi tidak

seperti yang seharusnya (tidak sesuai kenyataan). Berikut ini adalah contoh *fraud* terhadap laporan keuangan.

1. Memalsukan bukti transaksi.
2. Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya.
3. Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba.
4. Menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya.
5. Menerapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

2.2.1.3 Korupsi (*Corruption*)

ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu:

- a. Konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik ini merupakan benturan kepentingan antar seseorang atau kelompok contoh sederhananya: seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan (biasanya manajemen level) memiliki hubungan istimewa dengan pihak luar (entah itu orang atau badan usaha). Dikatakan memiliki hubungan istimewa karena memiliki kepentingan tertentu (misalnya: punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat, dan lain-lain). Ketika perusahaan bertransaksi dengan pihak luar ini, apabila seorang manajer/eksekutif

mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya itu, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka ini termasuk tindakan *fraud*. Hal tersebut sering disebut sebagai kolusi dan nepotisme.

- b. Suap menyuap, imbal balik (*briberies and excoiation*). Menyuap dan menerima suap merupakan tindakan *fraud*. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok *fraud* ini adalah: menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan (baik berupa data atau dokumen) apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu.

2.2.2 Asimetri Informasi

Menurut (Permatasari, Kurrohman, & Kartika, 2017) menyatakan bahwa Asimetri informasi merupakan keadaan dimana terjadi ketidak seimbangan informasi yang diperoleh oleh prinsipal dan agen. Kondisi semacam itu tentu saja dapat membuka peluang bagi pegawai pemerintah untuk melakukan kecurangan dengan menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuannya semata-mata hanya karena ingin mendapatkan penilaian yang baik atas kinerja yang telah dilakukan dengan memanipulasi informasi keuangan. Dengan kata lain asimetri informasi merupakan kondisi dimana adanya ketidakselarasan informasi yang di terima antara pihak yang menyediakan informasi atau yang memiliki informasi dengan pihak yang menerima atau membutuhkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.

Menurut Aranta, P (2013) ada 2 bentuk bentuk asimetri informasi, yaitu asimetri informasi vertical dan horizontal.

Bentuk-bentuk asimetri informasi

2.2.2.1 Asimetri informasi vertical

Yaitu adanya ketidak selarasan informasi yang mengalir dari tingkat yang lebih rendah (bawahan) ke tingkat yang lebih tinggi (atasan). Hal semacam ini akan merugikan manajemen/atasan karena tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya terjadi dari bawahan, dan akan menimbulkan kecurangan yang mungkin akan dilakukan bawahan.

2.2.2.2 Asimetri informasi horizontal

Adanya kesenjangan informasi antar pegawai yang memiliki jabatan yang sama namun bergerak pada bidang yang berbeda. Kejadian ini akan menimbulkan kecurangan yang mungkin akan dilakukan pegawai tersebut karena tidak memberikan informasi yang utuh atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dengan cara seperti itu akan mengakibatkan kesalahan pengertian atau miskom antar bidang dan otomatis akan merugikan pihak principal.

2.2.3 Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi

diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie, n.d.)

Menurut (Permatasari et al., 2017) penegakan hukum merupakan tindakan yang nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada di suatu negara. Penegakan hukum yang kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan untuk melakukan pelanggaran berupa kecurangan. Sedangkan penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi *fraud* di sektor pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tegak penegakan hukum dalam suatu organisasi atau instansi, maka kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi juga akan semakin rendah.

2.2.4 Kesesuaian Kompensasi

2.2.4.1 Pengertian Kompensasi

Menurut Veithzal (2006) dalam (Softian, 2017), kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan karyawan dalam bisnis perusahaan. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik yang harus dihitung dan diberikan

kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi/perusahaan tempat bekerja. Perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada para pekerja harus melakukan penghitungan kinerja dengan membuat sistem penilaian kinerja yang adil terlebih dahulu

Pemberian kompensasi ini bertujuan sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi yang akan diterima pegawai, yaitu: penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan perusahaan, produktivitas kerja pegawai, dll.

Menurut Veithzal (2006) dalam (Softian, 2017), kompensasi yang diberikan kepada karyawan terdiri dalam dua bentuk yaitu :

1. Kompensasi yang bersifat *financial*

Bentuk kompensasi ini ada dua macam, yaitu, kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung terdiri dari pembayaran karyawan dalam bentuk upah, gaji, bonus, atau komisi. Kompensasi tidak langsung atau benefit terdiri dari semua pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi financial langsung yang meliputi liburan, berbagai macam asuransi, jasa seperti perawatan anak atau kepedulian keagamaan, dan sebagainya.

2. Kompensasi yang bersifat *non financial*

Bentuk kompensasi ini bisa saja seperti pujian, promosi jabatan, dan pengakuan yang dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai, produktifitas, dan kepuasan pegawai.

2.2.4.2 Komponen Kompensasi

Menurut Veithzal (2006) dalam (Softian, 2017), komponen-komponen kompensasi terdiri atas 4 macam. komponen tersebut yaitu :

1. Gaji

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan fikiran dalam mencapai tujuan perusahaan.

2. Upah

Upah merupakan imbalan financial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan dan besarnya dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan.

3. Insentif

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan.

4. Kompensasi tidak langsung (*Fringe Benefit*)

Fringe benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan.

2.2.5 Moralitas Individu

Menurut (Ade, 2017) istilah moral berasal dari bahasa latin, bentuk tunggal kata moral yaitu *mos* sedangkan bentuk jamaknya yaitu *mores* yang masing-masing memiliki arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Bila kita membandingkan dengan arti kata etika, maka secara etimologis, kata etika bias diartikan moral karena kedua kata tersebut sama-sama memiliki arti yaitu kebiasaan, adat. Arti kata moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Menurut Rufaida, S (2014) menjelaskan tentang faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *Greed* (keserakahan). Dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang, yaitu sifat pribadi yang tidak pernah merasa puas terhadap apa yang sudah dimilikinya, ketika harta menjadi jembatan menuju kekuasaan, orang terdorong untuk melakukan apa saja untuk menggapainya, termasuk dengan cara yang curang. Orang dengan level penalaran moral yang rendah akan berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi delima etika. Dalam tindakanya, orang yang memiliki level penalaran rendah cenderung akan melakukan hal hal yang menguntungkan dirinya sendiri.

2.3 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Adi et al., 2016) yang berjudul analisi faktor faktor penentu kecurangan (*fraud*) pada sektor pemerintahan.

Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara penegakan hukum terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Sedangkan asimetri informasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

(Aranta, 2013) Melakukan sebuah penelitian yang berjudul pengaruh moralitas aparat dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dalam penelitian ini peneliti menghasilkan informasi bahwa moralitas aparat berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan asimetri berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

(Maula, 2017) melakukan penelitian yang berjudul analisis pengaruh faktor faktor pendorong tindak kecurangan terhadap kecenderungan aparatur pemerintahan melakukan *fraud*. Dalam penelitian ini dapat dihasilkan bahwa kepuasan penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan aparatur pemerintah melakukan *fraud*.

Dalam penelitian (Wulandari & Suryandari, 2016) yang berjudul faktor faktor yang mempengaruhi *fraud* pada satuan kerja pemerintah daerah kabupaten Temanggung. Penelitian yang menggunakan alat analisis data regresi berganda ini menyatakan bahwa adanya pengaruh positif asimetri informasi terhadap kecurangan/*fraud*. Tidak adanya pengaruh penegakan hukum terhadap kecurangan/*fraud*, serta adanya pengaruh negatif variabel moralitas individu terhadap kecurangan/*fraud*.

(Ade, 2017) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh ketaatan akuntansi, moralitas dan motivasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di pemerintah daerah kabupaten tanah datar. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui kuisisioner ini menunjukkan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan/*fraud*.

Menurut (Permatasari & Kartika, 2017) dalam penelitian yang berjudul analisis faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan (studi pada pegawai keuangan pemerintah kabupaten Banyuwangi). Penelitian yang menggunakan sampel pegawai pemerintah di Kabupaten Banyuwangi ini menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan/*fraud*. Kemudian adanya pengaruh negatif penegakan hukum terhadap kecurangan/*fraud*.

(Yasmin, 2018) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh penghasilan karyawan kepuasan kerja, dan integritas karyawan terhadap pengendalian diri dalam melakukan kecurangan pengadaan barang. Dalam penelitian yang dilakukan pada 6 rumah sakit pemerintah maupun swasta di Kota Tegal, Jawa Tengah dengan menggunakan kuisisioner sebagai media untuk mencari datanya ini menunjukkan bahwa penghasilan karyawan tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel pengendalian diri dalam melakukan kecurangan pengadaan barang pada rumah sakit.

Menurut (Softian, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh kesesuaian kompensasi, motivasi dan budaya etis organisasi terhadap kecurangan

laporan keuangan daerah yang menggunakan total sampling sebagai teknik pengambilan sampel menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Motivasi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan dan budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Menurut Dewi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan pada badan keuangan dan aset daerah Kab. Sleman dengan menggunakan kuisioner sebagai media untuk mencari datanya ini menunjukkan bahwa salah satu variabelnya yaitu kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang sesuai atau bahkan lebih tinggi akan mengurangi kecenderungan pegawai melakukan kecurangan.

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan/*Fraud*.

Teori agensi mengasumsikan adanya informasi asimetri antara agen dan principal. Asimetri informasi adalah kondisi adanya ketidakselarasan informasi yang di terima antara pihak yang menyediakan informasi (agen/pegawai) dengan pihak yang menerima (principal). Kondisi yang semacam itu akan dapat membuka peluang bagi pegawai untuk menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai

dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan mereka memberikan informasi yang salah tersebut semata mata karena ingin mendapatkan penilaian yang baik atas kinerjanya dengan berbagai cara termasuk dengan cara curang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Adi et al., 2016) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Berdasarkan kondisi ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

2.4.2 Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan/*Fraud*.

Berdasar teori *Fraud Triangle*, penegakan hukum yang baik berarti mengurangi adanya kesempatan pegawai melakukan kecurangan. Penegakan hukum yang kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran berupa kecurangan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tegak penegakan hukum dalam suatu organisasi atau instansi, maka kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi juga akan semakin rendah. Salah satu faktor yang juga mempengaruhi pegawai melakukan fraud adalah penegakan hukum, menurut (Usman, 2017) bahwa penegakan hukum berpengaruh signifikan terhadap kecurangan di sektor pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kokoh penegakan hukum dalam suatu instansi, maka

kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang terjadi rendah. Berdasarkan kondisi ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Penegakan hukum berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan/*fraud* di sektor pemerintahan.

2.4.3 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan/*Fraud*

Menurut Veithzal (2006) dalam (Softian, 2017), kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu bentuk upaya perusahaan dalam pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Menurut teori agensi, kompensasi yang sesuai akan mendorong pegawai melakukan kecurangan. Perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada para pekerja harus melakukan penghitungan kinerja dengan membuat sistem penilaian kinerja yang adil terlebih dahulu. Penelitian terdahulu juga membuktikan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Kurrohman, Pratiwi, & Andriana, 2016) Artinya semakin tinggi jumlah kompensasi yang diberikan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan kondisi ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

2.4.4 Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan/*Fraud*

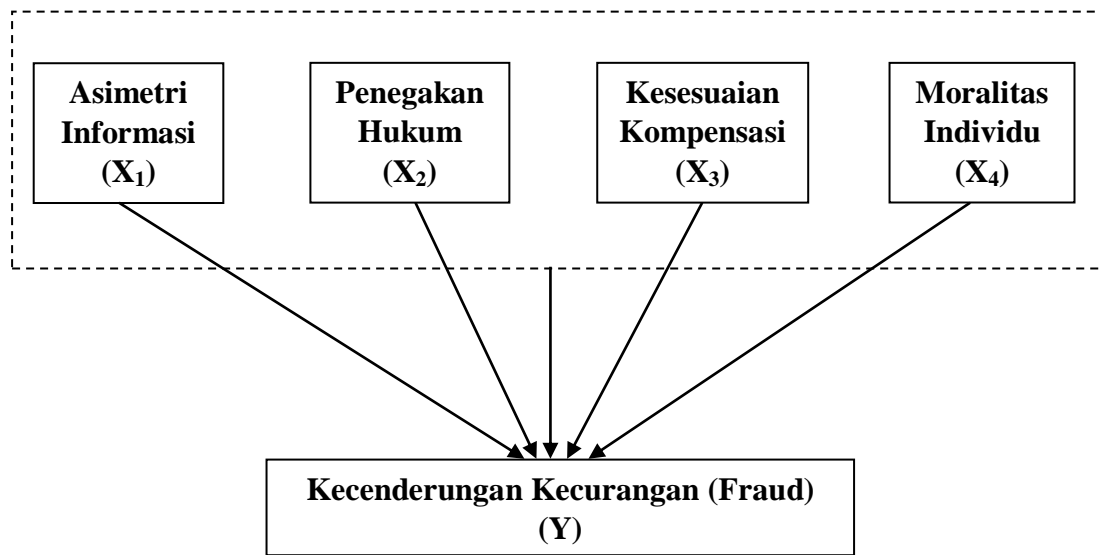
Faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *Greed* (keserakahan) (Rufaida, 2014). Dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang, yaitu sifat pribadi yang tidak pernah merasa puas terhadap apa yang sudah dimilikinya. Ketika harta menjadi jembatan menuju kekuasaan, orang akan terdorong untuk melakukan apa saja untuk menggapainya, termasuk dengan cara melakukan kecurangan. Teori yang dapat digunakan untuk mengobservasi dasar individu untuk melakukan kecurangan adalah *Teory Fraud Triangle*. Salah satu aspek yang terdapat pada teori ini adalah rasionalisasi. Albercht (2012) dalam Santoso & Adam (2014) menyatakan bahwa rasionalisasi adalah bentuk pembenaran diri sendiri atau alasan yang salah untuk suatu perilaku yang salah. Dengan adanya rasionalisasi dari pegawai melakukan kecurangan, maka semakin besar kemungkinan perilaku kecurangan akan terjadi.

Menurut (Wulandari & Suryandari, 2016) moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moral suatu individu, maka semakin cenderung tidak melakukan tindakan kecurangan. Berdasarkan kondisi ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan/*fraud* di sektor pemerintahan.

2.5 Gambar Kerangka Konseptual

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan, maka dapat digambarkan hubungan atau keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya, yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Penentuan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini populasinya adalah para aparat atau pegawai negeri sipil tetap yang bekerja di Dinas se-Kabupaten Klaten. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, teknik tersebut merupakan teknik dalam memilih sampel yang secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi kecenderungan pegawai melakukan kecurangan/*fraud*. Kriteria yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Berusia min 22 tahun
2. Masa kerja min 2 tahun
3. Pendidikan terakhir minimal SMA/Sederajat
4. Jabatan sebagai kasubbag, kasi, dan staf pada bagian keuangan

Berdasarkan kriteria diatas, sampel ditentukan sebanyak 150 responden. Sampel tersebut dirasa sudah mencukupi, didasarkan pada pendapat Sekaran (2006) yang mendasar pada Roscoe (1975) untuk menentukan sampel yang layak dalam penelitian adalah 30-500.

3.2 Sumber Data dan Tekhnik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer didapatkan oleh peneliti secara langsung dari obyek penelitian tanpa melewati

orang atau lembaga lain (Hadi, 2006). Data tersebut diperoleh dari persepsi responden dalam hal ini para aparat atau pegawai negeri sipil yang berada di Dinas se-Kabupaten Klaten.

Tekhnik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah set pertanyaan yang sudah disiapkan dan ditulis sebelumnya oleh peneliti, untuk dimintakan jawabanya dari responden (Hadi, 2006). Kuesioner dalam penelitian ini berisi tentang persepsi aparat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (fraud). Kuesioner tersebut disebar langsung kepada aparat yang bekerja pada Dinas se-Kabupaten Klaten.

Tabel 3.1. Dinas yang di Jadikan Sampel

No	Nama Dinas Pemerintahan Klaten
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
4	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
5	Pendidikan
6	Perdagangan, Koperasi, dan UKM
7	Kesehatan
8	Kependudukan dan Catatan Sipil
9	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	Perhubungan

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kecurangan.

Menurut *Black Law Dictionary* dalam (Suryana & Sadeli, 2015) Kecurangan atau *fraud* ialah kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat menyebabkan orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan. Pengertian lain mengenai *fraud* adalah penyajian yang salah/keliru (dalam pernyataan) yang secara ceroboh tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecenderungan kecurangan akuntansi terdiri dari beberapa pertanyaan yang dikembangkan oleh Tuannakota (2013) dalam (Najahningrum, 2013). Respon dari responden diukur menggunakan skala likert 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Semakin tinggi nilai yang di tunjukan maka semakin tinggi frekuensi kecurangan yang terjadi. Variabel ini diukur dengan indikator:

1. Kecenderungan untuk melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi
2. Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilangan peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan dari Laporan keuangan
3. Kecenderungan untuk melakukan kesalahan dalam menerapkan prinsip akuntansi secara sengaja
4. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian terhadap aktiva yang membuat barang/jasa tidak diterima
5. Kecenderungan untuk menyajikan laporan keuangan yang salah akibat perlakuan yang tidak semestinya pada aktiva disertai dokumen palsu

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen, dalam penelitian variabel independen nya adalah asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu. Diukur menggunakan kuisioner dengan skala likert 1-5 yaitu: Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Tidak Setuju (5). Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.3.2.1 Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana adanya ketidakselarasan informasi yang di terima antara pihak yang menyediakan informasi atau yang memiliki informasi dengan pihak yang menerima atau membutuhkan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, asimetri informasi merupakan suatu keadaan adanya ketidakseimbangan informasi yang diperoleh pihak principal dan agent. Kondisi yang semacam itu akan dapat membuka peluang bagi pegawai untuk menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan mereka memberikan informasi yang salah tersebut semata mata karena ingin mendapatkan penilaian yang baik atas kinerjanya dengan berbagai cara termasuk dengan cara curang.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur asimetri informasi terdiri dari enam item pertanyaan yang dikembangkan oleh Dunk (1993) dalam Wilopo (2006). Respon dari responden diukur skala likert 1-5, semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin tinggi asimetri informasi berkaitan dengan entitas tersebut. Variabel ini diukur dengan indikator :

1. Penyaji memiliki informasi yang lebih banyak
2. Penyaji lebih mengenal hubungan *input-output*
3. Penyaji lebih mengetahui apa yang sebenarnya dapat dicapai
4. Penyaji lebih mengenal teknis pekerjaan
5. Penyaji lebih mengetahui pengaruh faktor eksternal
6. Penyaji lebih mngetahui potensi kinerja.

3.3.2.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi *fraud* di sektor pemerintahan. Penegakan hukum yang kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran atau kecurangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tegak penegakan hukum dalam suatu organisasi atau instansi, maka kecenderungan kecurangan yang mungkin terjadi juga akan semakin rendah.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penegakan terdiri dari beberapa pertanyaan yang dikembangkan oleh Zulkarnain (2013) dalam Najahningrum (2013). Respon dari responden diukur menggunakan skala likert 1-5. Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin tinggi frekuensi kecurangan yang terjadi. Variabel ini diukur menggunakan indikator :

1. Aturan hukum yang berlaku
2. Ketanggapan pegawai terhadap pelanggaran
3. Standar dan peraturan yang ditetapkan instansi
4. Ketepatan waktu dalam bekerja
5. Kesesuaian tanggung jawab dalam bekerja
6. Sanksi

3.3.2.3 Kesesuaian Kompensasi

Kepuasan kompensasi adalah persepsi karyawan tentang sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. Menurut Veithzal (2006) dalam (Softian, 2017), kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan.

Tujuan pemberian kompensasi adalah sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan perusahaan, produktivitas kerja karyawan.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kesesuaian kompensasi terdiri dari beberapa item pertanyaan yang dikembangkan oleh Gibson (1997) dalam Wilopo (2006). Respon dari responden diukur dengan skala likert 1-5. Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin tinggi kesesuaian kompensasi berkaitan dengan entitas tersebut. Variabel ini diukur dengan indikator :

1. Kompensasi keuangan
2. Pengakuan perusahaan atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan
3. Promosi
4. Penyelesaian tugas

5. Pencapaian sasaran
6. Pengembangan pribadi

3.3.2.4 Moralitas Individu

Moralitas adalah keseluruhan norma-norma, nilai-nilai, dan sikap individu atau sebuah masyarakat. Moralitas merupakan sikap hati yang terungkap dalam perbuatan lahiriah (mengingat bahwa tindakan merupakan ungkapan dasar dari hati manusia), moralitas terdapat pada seseorang apabila orang tersebut mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan malah mencari keuntungan dari perbuatannya tersebut. Moralitas sebagai sikap dan perbuatan baik yang dilakukan tanpa pamrih. Pengertian lain tentang moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dinyatakan benar atau salah, baik atau buruk, atau dengan kata lain moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia.

Moralitas individu diukur melalui 6 (enam) pertanyaan yang mengukur setiap tahapan moralitas melalui kasus dilema etika akuntansi. Setiap item pertanyaan diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin tinggi moralitas individu berkaitan dengan entitas tersebut. Model pengukuran ini telah dikembangkan oleh Kohlberg (1969) dan Rest (1979) dalam Wilopo (2006) melalui kasus etika akuntansi.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 20. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari:

3.4.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sujarweni (2016). Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan berbagai karakteristik data seperti *mean*, *modus*, *quartile*, *varian* dan standar deviasi. Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan, peringkasan data dan penyajian hasil peringkasan tersebut. Penelitian akan menggunakan *maximum*, *minimum*, *mean* dan standar deviasi dalam bentuk tabulasi data responden dari hasil kuesioner. Tujuan dari statistik deskriptif untuk menguji dan menjelaskan karakteristik sampel data penelitian yang diobservasi.

3.4.2 Uji Kualitas Data

Kualitas data yang sudah dihasilkan, kemudian dievaluasi dengan menggunakan pengujian. Pengujian yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut :

3.4.2.1 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur kuisisioner penelitian yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Kuisisioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke

waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Cronbach's alpha masing-masing instrumen dari suatu variabel. Menurut (Ghozali, 2011) Suatu variabel dikatakan reliabel jika besarnya nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$.

3.4.2.2 Uji Validitas

Uji Validitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada pertanyaan atau pernyataan dari kuisisioner yang harus diganti atau di hilangkan karena dianggap tidak relevan. Dalam penelitian yang dilakukannya (Ghozali, 2011) menyatakan apabila nilai sig (2-tailed) pada skor konstruk $< 0,05$ berarti item pertanyaan dinyatakan valid. Uji validitas sering juga digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuisisioner, apakah item pada kuisisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur sesuatu yang ingin di ukur.

3.4.3. Uji Asumsi Klasik

Digunakan jika variabel independennya lebih dari satu sehingga diperlukan pengujian ke variabel independen hasil uji regresi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Sujarweni (2016)

3.4.3.1 Uji multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi dimana ada korelasi antara variabel bebas (independent) yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini multikolinearitas terindikasi apabila terdapat hubungan linier antara variabel-variabel independent dalam model regresi. Untuk mendeteksi tidak adanya kasus multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Faktor (VIF).

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menentukan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF < 10 . (Ghozali, 2011)

3.4.3.2 Uji heteroskedasitas

Dalam Ghozali (2011) menjelaskan bahwa tujuan dari uji heteroskedasitas adalah untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari variansi residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.3.3 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2011) menjelaskan bahwa uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi variabel data yang normal yaitu data yang distribusi normalnya membentuk garis yang mengikuti arah kurva normal. Apabila nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal.

3.4.4 Analisis Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Kecenderungan Kecurangan (Fraud)

X₁ : Asimetri Informasi

- X_2 : Penegakan Hukum
- X_3 : Kesesuaian Kompensasi
- X_4 : Moralitas Individu
- α : Konstanta
- β_{1-5} : Koefisien Regresi
- ε = Error (Kesalahan)

3.4.4.1 Uji Koefisien Determinan

Koefisien detreminan (R^2) pada intinya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien maka semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien maka semakin kecil pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

3.4.4.2 Uji F

Menurut Ghozali (2011) uji statistik F (uji signifikansi simultan) menunjukkan pada dasarnya apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). Uji F dilakukan dengan pendekatan *pearson correlation*, bila besarnya nilai probabilitas atau sig.(2 tailed) lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak.

3.4.4.3 Uji t

Menurut Ghozali (2011), uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Dalam penelitian ini menggunakan α sebesar 5%, yaitu dengan membandingkan *p-value*. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut :

- a. Apabila *p-value* > 5%, maka hipotesis ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila *p-value* < 5%, maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Objek pada penelitian ini adalah para pegawai sektor publik di Kabupaten Klaten yang bekerja sebagai staff, kasubbag, ataupun kasi. Berdasarkan pada teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan *purposive sampling*. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan 150 kuesioner ke dinas yang berkaitan. Kemudian sampel yang telah dipilih, selanjutnya akan digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Rincian pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner

No	Instansi	Kuesioner diberikan	Kuesioner yang kembali	Kuesioner yang tidak bisa diolah
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15	14	2
2	Perindustrian dan Tenaga Kerja	15	15	0
3	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga	15	13	0
4	Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan	15	14	2
5	Pendidikan	15	15	2

6	Perdagangan, Koperasi, dan UKM	15	14	1
7	Kesehatan	15	15	3
8	Kependudukan dan Catatan Sipil	15	13	0
9	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15	15	0
10	Perhubungan	15	13	2
	TOTAL	150	141	12

Tabel 4.2. Hasil Pengumpulan Data Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	150	100%
Kuesioner yang kembali	141	94%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	12	8%
Kuisisioner yang memenuhi syarat	129	86%

Dari tabel 4.2 dapat di lihat bahwa kuisisioner yang telah di sebar sebanyak 150, tetapi kuisisioner yang diisi oleh responden sebanyak 141. Sebanyak 12 kuisisioner tidak dapat digunakan karena pengisian jawaban tidak lengkap, sehingga kuisisioner yang dapat di gunakan sebanyak 129.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, jabatan, dan pendidikan terakhir. Karakteristik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1 Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Pria	55	43%
2	Wanita	74	57%
	Total	129	100%

Dari data pada tabel 4.3 di atas, bisa disimpulkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuisioner dengan lengkap adalah wanita sebanyak 74 responden atau sebesar 57% sedangkan pria hanya sebanyak 55 responden atau sebesar 43%.

4.2.2 Usia Responden

Karakteristik responden berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Usia Responden

No	Usia	Jumlah	Presentasi
----	------	--------	------------

1	20-30 tahun	24	19%
2	31-40 tahun	46	36%
3	41-50 Tahun	38	29%
4	>50 tahun	21	16%
	Total	129	100%

Dari data tabel 4.4 diatas, bisa disimpulkan bahwa sebanyak 24 dari 129 responden atau 19% dari total sampel berusia 20-30 tahun, kemudian sebanyak 46 dari 129 responden atau sebesar 36% dari total sampel berusia 31-40 tahun. Sebanyak 38 responden berusi 41-50 dan terakhir sebanyak 21 responden berusia 50 keatas.

4.2.3 Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentas
1	SMA / SLTA	27	21%
2	D3	43	33%
3	S1	56	44%
4	S2	3	2%

5	S3	0	0%
	Total	129	100%

Berdasarkan pada data tabel 4.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuisisioner dengan lengkap berpendidikan S1 sebanyak 56 responden dari total sampel sebanyak 129. Sisanya sebanyak 43 responden berpendidikan D3, sebanyak 27 responden berpendidikan SMA / SLTA dan 3 responden berpendidikan S2.

4.2.4 Masa Kerja

Karakteristik responden berdasarkan lamanya bekerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Karakteristik Reponden Berdasarkan Masa Jabatan

No	Masa Jabatan	Jumlah	Presentas
1	< 5 tahun	17	14%
2	5-10 tahun	38	29%
3	>10 tahun	74	57%
	Total	129	100%

Berdasarkan data pada tabel 4.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuisisioner dengan lengkap sebanyak 74 responden sudah

bekerja lebih dari 10 tahun, sisanya 38 responden bekerja 5-10 tahun, dan 17 responden lagi masih terbilang baru yang bekerja kurang dari 5 tahun.

4.3 Statistik Deskriptif

Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kecenderungan Fraud	129	8	30	17.10	5.330
Asimetri Informasi	129	6	24	17.30	4.839
Penegakan Hukum	129	6	23	11.80	3.032
Kesesuaian Kompensasi	129	9	36	22.21	4.789
Moralitas Individu	129	6	21	12.29	3.437
Valid N (listwise)	129				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel 4.7 mengenai hasil uji statistik deskriptif, dapat di ambil beberapa kesimpulan bahwa,

1. Hasil penelitian responden terhadap variabel kecenderungan fraud menunjukkan bahwa nilai minimum pertanyaan yang dijawab responden adalah sebesar 8 dan nilai maximum pertanyaan yang dijawab responden adalah sebesar 30. Rata rata aktual (*mean*) variabel kecenderungan fraud

adalah 17.10. Sedangkan standar deviasi menunjukkan bahwa ukuran penyebaran dari variabel kecenderungan fraud adalah sebesar 5.330 dari 129 responden yang telah diteliti. Standar deviasi sebesar 5.330 lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 17.10 dan itu menunjukkan bahwa penyimpangan data dinilai kecil.

2. Hasil penelitian responden terhadap variabel asimetri informasi menunjukkan bahwa nilai minimum pertanyaan yang dijawab responden adalah sebesar 6 dan nilai maximum pertanyaan yang dijawab responden adalah sebesar 24. Rata-rata aktual (mean) variabel asimetri informasi adalah sebesar 17.30. Sedangkan standar deviasi menunjukkan bahwa ukuran penyebaran dari variabel asimetri informasi adalah sebesar 4.839 dari 129 responden yang telah diteliti. Standar deviasi sebesar 4.839 lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 17.30 dan itu menunjukkan bahwa penyimpangan data dinilai kecil.
3. Hasil penelitian responden terhadap variabel penegakan hukum menunjukkan bahwa nilai minimum pertanyaan yang dijawab responden adalah sebesar 6 dan nilai maximum pertanyaan yang dijawab responden adalah sebesar 23. Rata-rata aktual (mean) variabel penegakan hukum adalah sebesar 11.80. Sedangkan standar deviasi menunjukkan bahwa ukuran penyebaran dari variabel penegakan hukum adalah sebesar 3.032 dari 129 responden yang

telah diteliti. Standar deviasi sebesar 3.032 lebih kecil dari rata-rata sebesar 11.80 dan itu menunjukkan bahwa penyimpangan data dinilai kecil.

4. Hasil penelitian responden terhadap variabel kesesuaian kompensasi menunjukkan bahwa nilai minimum pertanyaan yang dijawab responden adalah sebesar 9 dan nilai maximum pertanyaan yang dijawab responden adalah sebesar 36. Rata-rata aktual (mean) variabel kesesuaian kompensasi adalah sebesar 22.21. Sedangkan standar deviasi menunjukkan bahwa ukuran penyebaran dari variabel kesesuaian kompensasi adalah sebesar 4.789 dari 129 responden yang telah diteliti. Standar deviasi sebesar 4.789 lebih kecil dari rata-rata sebesar 22.21 dan itu menunjukkan bahwa penyimpangan data dinilai kecil.

5. Hasil penelitian responden terhadap variabel moralitas individu menunjukkan bahwa nilai minimum pertanyaan yang dijawab responden adalah sebesar 6 dan nilai maximum pertanyaan yang dijawab responden adalah sebesar 21. Rata-rata aktual (mean) variabel moralitas individu adalah sebesar 12.29. Sedangkan standar deviasi menunjukkan bahwa ukuran penyebaran dari variabel moralitas individu adalah sebesar 3.437 dari 129 responden yang telah diteliti. Standar deviasi sebesar 3.437 lebih kecil dari rata-rata sebesar 12.29 dan itu menunjukkan bahwa penyimpangan data dinilai kecil.

4.4 Uji Kualitas Data

4.4.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menyatakan sebuah kuesioner dianggap valid atau layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi bivariate dengan melihat output Pearson Correlation (Ghozali, 2011). Dengan kriteria jika nilai sig (2-tailed) pada total skor konstruk $< 0,05$ item pernyataan dikatakan valid. Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8. berikut ini.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Sig(2tailed)	Keterangan
Kecenderungan Fraud	Y1	0.000	Valid
	Y2	0.000	Valid
	Y3	0.000	Valid
	Y4	0.000	Valid
	Y5	0.000	Valid
	Y6	0.000	Valid
	Y7	0.000	Valid
	Y8	0.000	Valid
	Y9	0.000	Valid
Asimetri Informasi	X.1.1	0.000	Valid
	X.1.2	0.000	Valid
	X.1.3	0.000	Valid
	X.1.4	0.000	Valid

	X.1.5	0.000	Valid
	X.1.6	0.000	Valid
Penegakan Hukum	X.2.1	0.000	Valid
	X.2.2	0.000	Valid
	X.2.3	0.000	Valid
	X.2.4	0.000	Valid
	X.2.5	0.000	Valid
	X.2.6	0.000	Valid
Kesesuaian Kompensasi	X.3.1	0.000	Valid
	X.3.2	0.000	Valid
	X.3.3	0.000	Valid
	X.3.4	0.000	Valid
	X.3.5	0.000	Valid
	X.3.6	0.000	Valid
	X.3.7	0.000	Valid
	X.3.8	0.000	Valid
	X.3.9	0.000	Valid
Moralitas Individu	X.4.1	0.000	Valid
	X.4.2	0.000	Valid
	X.4.3	0.000	Valid
	X.4.4	0.000	Valid
	X.4.5	0.000	Valid
	X.4.6	0.000	Valid

Sumber : Hasil olah data primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 Disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid, hal ini bisa dilihat dari nilai masing-masing item pertanyaan memiliki nilai total konstruk kurang dari 0.05.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Reabilitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur yang digunakan dalam penelitian. (Hadi, Syamsul 2006) pengujian dilakukan untuk menguji kestabilan dan konsistensi instrumen dari waktu ke waktu. Data yang diperoleh dapat dikatakan *reliable* apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar atau sama dengan 0.60. Hasil pengujian ini terlihat pada tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Y	0.776	Reliabel
X1	0.800	Reliabel
X2	0.763	Reliabel
X3	0.758	Reliabel
X4	0.771	Reliabel

Sumber : Hasil olah data primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 yang berarti telah reliabel, sehingga layak digunakan menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Untuk menentukan analisis regresi linear berganda diperlukan uji asumsi klasik yang harus dipenuhi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

4.5.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat kolerasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan melihat dari besarnya nilai korelasi. Apabila nilai korelasi $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0.935	1.070
X2	0.706	1.417
X3	0.710	1.408
X4	0.958	1.044

Sumber : Hasil olah data primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari keempat variabel independen lebih dari 0.10 dan VIF kurang dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut terbebas dari masalah multikolinearitas, sehingga layak untuk digunakan.

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Dasar pengambilan keputusan Uji Heteroskedastisitas dapat di lihat apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka dapat di simpulkan bahwa data

yang sudah di uji tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut ini.

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Nilai Signifikansi
Kecenderungan Fraud (Y1)	0.962
Asimetri Informasi (X1)	0.356
Penegakan Hukum (X2)	0.336
Kesesuaian Kompensasi (X3)	0.230
Moralitas Individu (X4)	0.031

Sumber : Hasil olah data primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa variabel kecenderungan fraud, asimetri informasi, penegakan hukum, dan kesesuaian kompensasi memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.05 yang berarti layak untuk digunakan. Sedangkan variabel moralitas individu memiliki nilai signifikansi sebesar 0.031 yang berarti variabel ini memiliki masalah heteroskedastisitas. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya selisih/rentan antara nilai minimum dengan maximum yang cukup besar.

4.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal ataukah tidak.. Dasar pengambilan keputusannya:

- a. Jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) $< 0,05$ artinya data residual tidak berdistribusi normal.
- b. Jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) $> 0,05$ artinya data residual berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		129
Normal Parameters	Mean	OE-7
	Std. Deviation	4.57992220
Most Extreme Differences	Absolute	0.082
	Positive	0.082
	Negative	0.059
Kolmogorov-Smirnov Z		0.929
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.353

Sumber : Hasil olah data primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.12 hasil Uji Normalitas di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.353. Hasil tersebut lebih besar dari 0.05, oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa data residual pada model regresi ini

berdistribusi normal, sehingga model regresi pada penelitian ini layak untuk dipakai dalam penelitian.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, moralitas individu terhadap kecenderungan *fraud*. Hasil perhitungan regresi linier berganda dengan program SPSS disajikan pada tabel 4.13.

Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized	t hitung	Sig.
	Coefficients		
	B		
1 (Constant)	4.906	1.715	0.089
Asimetri Informasi	0.266	3.022	0.003
Penegakan Hukum	-0.011	-0.008	0.946
Kesesuaian Kompensasi	-0.006	-0.057	0.954
Moralitas Individu	-0.640	5.232	0.000

c. Dependent variable : Kecenderungan Fraud

Sumber: Hasil olah data primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.13 uji regresi linier berganda di atas maka model persamaan regresi yang di gunakan adalah sebagai berikut

$$Y = 4.906 + 0,266X_1 - 0,011X_2 - 0,006X_3 - 0,640X_4$$

Di mana:

Y = Kecenderungan *Fraud*

X₁ = Asimetri Informasi

X₂ = Penegakan Hukum

X₃ = Kesesuaian Kompensasi

X₄ = Moralitas Individu

4.6.1 Uji Koefisien Determinan

Koefisien detreminan (R²) pada intinya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien maka semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien maka semakin kecil pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinan dapat di lihat pada tabel 4.14 berikut ini.

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.511	0.262	0.238	4.653

a. *Predictors: (Constans), Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Penegakan Hukum*

b. *Dependent Variable: Kecenderungan Fraud*

Berdasarkan data pada tabel 4.14 tersebut diketahui dari hasil uji koefisien determinan dihasilkan nilai adjusted r square sebesar 0.238. hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variasi variabel independen dalam mempengaruhi atau menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0.238 atau 23,8%. Sedangkan sisanya 76,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.6.2 Uji F

Uji statistik F (uji signifikansi simultan) menunjukkan pada dasarnya apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat) (Ghozali 2013). Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini

Tabel 4.15 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig.
1 Regression	950.802	4	237.700	10.978	0.000b
Residual	2684.888	124	21.652		
Total	3635.690	128			

a. *Dependent Variable : Kecenderungan Fraud*

b. *Predictors : (Constans), Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Penegakan Hukum*

Berdasarkan pada tabel 4.15 hasil dari uji F signifikannya sebesar 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha=5\%$. Dengan demikian variasi nilai variabel bebas atau variabel independen dapat menjelaskan variasi nilai dependen. Sehingga variable Asimetri Informasi, Penegakan Hukum, Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Individu secara bersama-sama (simultan) terhadap Kecenderungan *Fraud*.

4.6.3 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Pada prosedur uji probabilitas statistik t atau nilai p kita hanya membandingkan nilai probabilitas p dengan nilai signifikansi α yang kita pilih. . Dalam penelitian ini menggunakan α sebesar 5%, yaitu dengan membandingkan *p-value*. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut :

- a. Apabila *p-value* > 5%, maka hipotesis ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila *p-value* < 5%, maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 4.13 dapat di simpulkan bahwa,

- a. Konstanta sebesar 4.906 menunjukkan variabel-variabel independen (Asimetri Informasi, Penegakan Hukum, Kesesuaian Kompensasi, dan

Moralitas Individu) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (Kecenderungan *Fraud*) adalah sebesar 11,167 %.

- b. Koefisien uji t asimetri informasi adalah 0.266, nilai signifikansinya adalah 0.003, dan t hitungnya adalah 3.022. Dari hasil tersebut dapat diketahui nilai signifikansi nya sebesar 0.003 yang berarti lebih kecil daripada 0.05, dan t hitung diketahui sebesar 3.022 yang berarti lebih besar dari t tabel sebesar 1.979. Hal ini dapat diartikan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan fraud. Sehingga hipotesis pertama **diterima**.
- c. Koefisien uji t penegakan hukum adalah -0.011, nilai signifikansinya adalah 0.946, dan t hitungnya adalah -0.008. Dari hasil tersebut dapat diketahui nilai signifikansi nya sebesar 0.946 yang berarti lebih besar dari 0.05, dan t hitungnya diketahui sebesar -0.008 yang berarti lebih kecil dari t tabel sebesar 1.979. Hal ini dapat diartikan bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*. Sehingga hipotesis kedua **ditolak**.
- d. Koefisien uji t kesesuaian kompensasi adalah -0.006, nilai signifikansinya adalah 0.954, dan t hitungnya adalah -0.057. Dari hasil tersebut diketahui nilai signifikansinya sebesar 0.954 yang berarti lebih lebih besar dari 0.05, dan t hitungnya diketahui sebesar -0.057 yang berarti lebih kecil dari t tabel sebesar 1.979. hal ini dapat diartikan bahwa kesesuaian kompensasi tidak

berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*. Sehingga hipotesis ketiga **ditolak**.

- e. Koefisien uji t moralitas individu adalah -0.640, nilai signifikansinya adalah 0.000, dan t hitungnya adalah 5.232. Dari hasil tersebut diketahui nilai signifikansinya sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0.05, dan t hitungnya diketahui sebesar 5.232 yang berarti lebih besar dari t tabel sebesar 1.979. Hal ini dapat diartikan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan *fraud*. Sehingga hipotesis keempat **diterima**.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan *Fraud*

Pengujian dilakukan melalui signifikansi koefisien regresi variabel asimetri informasi. Asimetri informasi memiliki nilai koefisien positif sebesar 0.266, nilai signifikansi sebesar 0.003, dan t hitung sebesar 3.022. Seperti yang sudah diujikan dengan menggunakan uji t, hasil ini menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan pegawai sektor pemerintahan untuk melakukan kecurangan.

Menurut Najahningrum, Ikhsan, dan Sari (2013) Asimetri informasi adalah merupakan kondisi dimana pihak dalam atau pengelola perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar atau pihak pemakai informasi. Dalam lingkup ini yang menjadi pemakai informasi adalah masyarakat.

Karena pihak dinas pemerintah merupakan pihak pengelola dana APBN yang sebagian besar berasal dari masyarakat sendiri. Jika masyarakat tidak mengetahui semua transaksi yang terjadi secara detail, tidak menutup kemungkinan bahwa penyaji laporan akan memanipulasi laporan tersebut dengan tujuan kepentingan individu, sebagai contoh supaya kinerjanya terlihat baik. Menurut Nurharjanti (2017) apabila agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal serta agen dan principal memiliki kepentingan yang berbeda, maka akan terjadi masalah prinsipal-agen, agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rufaida (2014), Dewi (2017), dan Pertiwi (2016) yang menyatakan bahwa asimetri informasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat asimetri informasi antara pihak pengelola laporan keuangan dengan pihak pemakai laporan keuangan, maka terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) akan semakin tinggi.

4.7.2 Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan *Fraud*

Pengujian dilakukan melalui signifikansi koefisien regresi variabel penegakan hukum. Penegakan hukum memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0.011, nilai signifikansi sebesar 0.946, dan t hitung sebesar -0.008. Seperti yang sudah diujikan dengan menggunakan uji t, hasil ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai melakukan *fraud*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tegak atau tidaknya peraturan atau hukum pada suatu instansi tidak akan mempengaruhi kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Menurut teori *fraud triangle*, salah satu aspek dalam teori ini adalah kesempatan. Menurut (Pravitasari, 2016) kesempatan adalah situasi terbukanya kesempatan bagi pegawai yang memungkinkan untuk terjadinya tindak kecurangan. Adanya kesempatan atau peluang tersebut karena pengendalian internalnya lemah, pengawasan yang kurang baik, serta lemahnya penegakan hukum di instansi tersebut.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rufaida (2014) dan Najahningrum, Ikhsan, dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan, menurut mereka semakin tinggi tingkat penegakan hukum di suatu entitas, maka akan menurunkan tingkat kecenderungan pegawai untuk melakukan suatu kecurangan. Apabila suatu organisasi mampu menegakan peraturan dengan memberikan sanksi sanksi yang tegas terhadap pegawai yang melakukan tindak kecurangan atau tidak disiplin, dengan kata lain organisasi mampu mengoptimalkan aturan-aturan hukum dan penerapan SOP sesuai aturan, bukan tidak mungkin pegawai akan enggan untuk melakukan sebuah kecurangan atau akan menurunkan tingkat kecenderungan kecurangan. Menurut Najahningrum, Ikhsan, dan Sari (2013) dalam suatu entitas, apabila penegakan hukum kurang efektif maka akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan

pelanggaran peraturan yang bisa saja mengarah pada perilaku menyimpang, salah satunya dengan melakukan kecurangan keuangan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Hal tersebut dapat terjadi karena adanya ketidakjujuran responden dalam menjawab pertanyaan maupun pernyataan yang diberikan oleh penulis. Atau mungkin karena adanya tuntutan tinggi dari pihak eksternal maupun internal pegawai yang mengharuskan pegawai tersebut untuk melakukan kecurangan tanpa menghiraukan resiko yang akan terjadi ketika kecurangan yang pegawai tersebut lakukan terbongkar.

4.7.3 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan *Fraud*

Pengujian dilakukan melalui signifikansi regresi variabel kesesuaian kompensasi. Kesesuaian kompensasi memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0.006, nilai signifikansi sebesar 0.954, dan t hitung sebesar -0.057. Seperti yang sudah diujikan dengan menggunakan uji t, hasil ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai melakukan fraud.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Pravitarsari (2016) dan Fadhli, dkk (2014) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan sebuah kecurangan. Namun penelitian ini juga berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Softian (2017), Dewi (2017), dan Pravitarsari (2016).

Mereka menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan.

Hasil ini berlawanan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa semakin baik kesesuaian kompensasi maka akan mengurangi tingkat kecenderungan pegawai melakukan kecurangan. Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Wilopo (2006) menjelaskan dalam teori keagenan (*agency theory*) bahwa pemberian kompensasi yang memadai membuat agen (manajemen) bertindak sesuai dengan keinginan dari principal (pemegang saham) dengan memberikan informasi yang benar-benar terjadi tentang keadaan organisasi. Dalam teori ini juga dikatakan bahwa adanya promosi, kompensasi, atau bonus yang tidak sesuai dengan harapan akan memicu faktor pegawai untuk melakukan praktik kecurangan.

Dari penelitian ini menjelaskan bahwa dengan pemberian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan karena pribadi atau karakter pegawai yang bekerja pada dinas Kabupaten Klaten tidak begitu mengharapkan kompensasi yang besar, karena mereka hanya fokus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selama kompensasi yang diterima dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka bagi mereka tidak ada masalah. Bagi mereka yang terpenting adalah memberikan kinerja yang terbaik untuk instansi, maka dengan itu kompensasi yang diterima akan menyesuaikan atas usaha yang telah dikeluarkan.

4.7.4 Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan *Fraud*

Pengujian dilakukan melalui signifikansi regresi variabel moralitas individu. Moralitas individu memiliki nilai koefisien positif sebesar 0.640, nilai signifikansi sebesar 0.000, dan t hitung sebesar 5.232. seperti yang sudah diujikan dengan menggunakan uji t, hasil ini menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan pegawai melakukan fraud.

Moralitas merupakan suatu hal penting yang dapat mempengaruhi perilaku seorang individu. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengobservasi dasar individu dalam melakukan tindakan adalah *teory fraud triangel*. Salah satu aspek yang terdapat pada teori ini adalah rasioanlisasi. Rasioanlisasi adalah sikap karakter atau serangkaian nilai nilai etis yang memperbolehkan manajemen atau pegawai melakukan tindakan yang tidak jujur. Menurut Albrecht (2012) dalam penelitian yang dilakukan santoso & Adam (2014) menjelaskan bahwa rasionalisasi adalah bentuk pembenaran diri sendiri atau alasan yang salah untuk suatu perilaku yang salah. Dengan adanya rasionalisasi dari pegawai melakukan kecurangan, maka semakin besar kemungkinan perilaku kecurangan akan terjadi.

Jadi dapat dikatakan bahwa moralitas yang terdapat pada masing masing individu merupakan gambaran suatu individu tersebut dalam melakukan tindakan atau perilaku baik ataupun buruk. Apabila tingkat moralitas individu tinggi atau baik dan memiliki sikap kepribadian yang jujur, meskipun pengendalian internal di suatu organisasi itu lemah maka individu tersebut akan tetap enggan untuk melakukan tindakan kecurangan. Berbeda dengan individu yang memiliki moral

lemah, ketika dalam keadaan terdesak individu tersebut akan mencari cara untuk melakukan kecurangan demi tercapainya keinginan individunya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2016), Ade (2017), dan Wulandari & Suryandari (2016) yang menyatakan bahwa moralitas individu memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa semakin tinggi suatu moral individu maka akan semakin kecil kemungkinan untuk melakukan suatu kecurangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kecenderungan pegawai melakukan kecurangan (*fraud*) pada sektor publik maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Asimetri Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan pegawai melakukan kecurangan (*fraud*). Hal ini dikarenakan apabila pihak pengelola dengan pihak pemakai memiliki asimetri informasi yang tinggi, maka kemungkinan kecurangan akan semakin tinggi pula.
2. Penegakan Hukum tidak berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan bahwa tegak atau tidaknya penegakan hukum pada suatu organisasi, tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan (*fraud*).
3. Kesesuaian Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Hal tersebut membuktikan bahwa pemberian promosi, kompensasi ataupun bonus yang sesuai kepada pegawai tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan (*fraud*).

4. Moralitas Individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan apabila tingkat moralitas individu tinggi atau baik dan memiliki sikap kepribadian yang jujur, meskipun pengendalian internal di suatu organisasi itu lemah maka individu tersebut akan tetap enggan untuk melakukan tindakan kecurangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Dalam penelitian ini terdapat besarnya presentase variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian
2. Distribusi kuisioner kepada pegawai pemerintahan di Kabupaten Klaten yang memenuhi kriteria pengambilan sampel kurang merata.
3. Penelitian ini menggunakan metode survei yang menggunakan kuisioner yang tidak dilengkapi dengan wawancara atau observasi langsung ke lapangan. Hal tersebut mengakibatkan kurang detailnya data yang diperoleh sehingga pembahasan menjadi kurang mendalam.
4. Terdapat kendala heteroskedastisitas pada variabel moralitas individu dalam penelitian ini yang mengakibatkan hasil penelitian dari variable ini tidak dapat dipercaya 100%.

5.3 Saran

Saran yang diberikan penulis untuk pihak instansi di Kabupaten Klaten adalah,

1. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Maka dari itu penulis meminta kepada segenap instansi pemerintahan di Kabupaten Klaten untuk lebih terbuka atau transparan lagi dengan masyarakat mengenai laporan keuangan yang terjadi pada instansi.

Saran yang diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya adalah,

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih merata sehingga hasil penelitian diharapkan dapat lebih mencerminkan realita.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independent lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, sehingga dapat meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi pegawai untuk melakukan kecurangan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas responden. Tidak hanya di bagian keuangan saja melainkan bisa ke bagian yang lain, misalnya di bagian logistik atau bagian pengadaan barang. Karena bentuk kecurangan tidak bisa di lakukan pada satu bagian saja, tetapi akan merambah ke bagian yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Afri. (2017). Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Moralitas dan Motivasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Adi, M., Ardiyani, K., & Ardianingsih, A. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (Fraud) pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan)*. Jurnal Litbang, 10.
- Adinda, Yanita. (2015). Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah Kabupaten Klaten. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Aranta, Petra Yulia. (2013). Pengaruh Moralitas Aparat dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pemerintah Kota Sawahlunto). *Skripsi*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Asshiddiqie, J. (n.d.). (2008). Penegakan Hukum.
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Dewi, Citra Ratna. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sleman). *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Dewi, Gusti. (2016). *Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal pada Kecurangan Akuntansi*. Jurnal Imiah Akuntansi, 1(1), 77–92.
- Dewi, K., & Ratnadi, N. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Integritas Pada Kecenderungan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. Dalam: *Akuntansi*, 18(2), 917-941.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (edisi Keempat)*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hadi, S. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Kurrohman, T., Pratiwi, E., & Andriana. (2016). *Deteksi Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Jember)*. Jember: Universitas Jember.
- Maula, K. (2017). *Analisis Pengaruh Faktor- Faktor Pendorong Tindak Kecurangan terhadap Kecenderungan Aparatur Pemerintah Melakukan Fraud (Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Banyumas)*, 2(1), 273–287.
- Mulia, H., Febrianto, R., & Kartika, R. (2017). *Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi*. *Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 198–208.
- Najahningrum, Anik Fatun. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud: Presepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Dalam: *Accounting Analysis Journal* 2(3):262-266.
- Nurharjanti, N. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. Dalam: *Akuntansi dan Investasi* 18(2),209-221.
- Permatasari, D., Kurrohman, T., & Kartika. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah (Studi pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)*. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(1), 37–44.
- Pertiwi, Mega Laksmitha. (2016). *Pengaruh Moralitas Individu, Pengendalian Internal, dan Asimetri informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di Perguruan Tinggi*. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Pravitasari, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Rufaida, Syafiratul. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di DPPKA dan KPPD di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Santoso, M., & Adam, H. (2014). *Analisis Perilaku Kecurangan Akademik Pada*

Mahasiswa Akuntansi Dengan Menggunakan Konsep Fraud Triangle (Studi pada Mahasiswa S1 Kota Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB.

- Sekaran, Uma. (2011). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat.
- Softian, Pria Agung. (2017). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Motivasi Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Daerah (Studi empiris pada SKPD Kab Lima Puluh Kota). Padang: Universitas Negeri Padang.
- Sugiyono. (2007). *Statistika untuk Penelitian*. (E. Mulyatiningsih, Ed.). Jawa Barat: CV ALFABETA.
- Sujarweni, V.Wiratna. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suryana, A., & Sadeli, D. (2015). *Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan, 2(2), 127–138.
- Syahrina, D., Irianto, G., & Prihatiningtyas, Y. (2017). *Budaya Cari Untung sebagai Pemicu Terjadinya Fraud: Sebuah Studi Etnografi*. Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 6(1), 73–84.
- Usman, Syahrani. (2017). Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Widarjono, Agus. (2015). *Statistika Terapan Dengan Excel & SPSS*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wulandari, R., & Suryandari, D. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung*. Accounting Analysis Journal, 5(2), 76–85.
- Yasmin, A. (2018). *Pengaruh Penghasilan Karyawan, Kepuasan Kerja, dan Integritas Karyawan terhadap Pengendalian Diri dalam Melakukan Kecurangan Pengadaan Barang*. Jurnal MONEX, 7(1).

LAMPIRAN

Lampiran I
Kuisisioner Penelitian
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Pegawai
Melakukan Kecurangan/Fraud Dalam Sektor Pemerintahan
(Studi Kasus Pada Pemerintahan di Kabupaten Klaten)

Sehubungan dengan memenuhi tugas akhir, maka peneliti :

Nama : M.Hildan Zaka F
NIM : 14312410
Jurusan/ Fak : Akuntansi/Ekonomi UII

Bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan / *Fraud* dalam Sektor Pemerintahan yang dilakukan pada Pemerintahan di Kabupaten Klaten”**. Untuk itu, diharapkan kesediaan dari Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktunya dan menjadi responden dengan mengisi lembar kuisisioner ini secara lengkap dan sejujurnya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan kerahasiaanya akan dijaga sesuai dengan etika penelitian.

Terimakasih atas kerjasama dan kesungguhan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuisisioner ini.

Hormat Saya,

M.Hildan Zaka F.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama* : (*Boleh tidak diisi)
2. Jenis kelamin :
3. Umur : (Tahun)
4. Jabatan :
5. Masa Kerja : (Tahun)
6. Pendidikan Terakhir :

Petunjuk Pengisian :

Berikut ini merupakan pernyataan-pernyataan yang mewakili pendapat-pendapat umum mengenai kondisi di dalam instansi Saudara. Tidak ada pernyataan yang benar atau salah. Saudara mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Kami ingin mengetahui seberapa jauh Saudara setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, dengan memberi tanda checklist (\checkmark) pada pilihan yang tersedia sebagai berikut :

Penilaian

- STS : Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- N : Netral
- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju

NO	KECURANGAN (FRAUD)	STS	TS	N	S	SS
1	Suatu hal yang wajar di instansi saya, apabila untuk suatu tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari semestinya					
2	Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang					
3	Suatu yang wajar bagi instansi saya, apabila untuk tujuan tertentu harga beli peralatan/perengkapan kantor dicatat lebih tinggi					
4	Merupakan sesuatu yang wajar di instansi saya apabila pengguna anggaran memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai ke dalam belanja peralatan gedung kantor					
5	Suatu hal yang wajar apabila di instansi saya, para pengguna anggaran menggunakan kuitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan kantor					
6	Bukan suatu masalah bagi instansi saya apabila perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dibeli					
7	Tidak menjadi suatu masalah bagi instansi saya apabila suatu transaksi memiliki bukti pendukung ganda					
8	Suatu hal yang wajar apabila di instansi saya ditemukan adanya pengeluaran tanpa dokumen pendukung					
9	Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila sisa anggaran dibagikan kepada pegawai sebagai bonus					

NO	Asimetri Informasi	STS	TS	N	S	SS
1	Atas semua pekerjaan di bidang akuntansi, hanya pihak internal instansi saja yang mengetahui seluruh informasi yang berkaitan dengan transaksi perusahaan yang mempunyai dampak keuangan.					
2	Hanya pihak internal instansi yang memahami seluruh hubungan antara data transaksi keuangan dan proses penyusunan laporan keuangan.					
3	Hanya pihak internal instansi yang mengetahui dan memahami isi dan angka laporan keuangan yang sudah selesai dikerjakan					
4	Hanya pihak internal instansi yang mengetahui isi dan angka yang sebenarnya dari laporan keuangan yang disusun.					
5	Hanya pihak internal instansi yang mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembuatan laporan keuangan.					
6	Hanya pihak internal instansi yang mengetahui lika-liku pembuatan laporan keuangan.					

NO	Penegakan Hukum	STS	TS	N	S	SS
1	Di instansi tempat saya bekerja, ada aturan-aturan hukum yang berlaku.					
2	Di instansi tempat saya bekerja, saya merasa para pegawai tanggap dalam penanganan pelanggaran peraturan.					
3	Di instansi tempat saya bekerja, kegiatan operasional instansi dilaksanakan sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi dan pemerintah.					
4	Di instansi tempat saya bekerja, semua pegawai datang dan pulang tepat waktu.					
5	Di instansi tempat saya bekerja, semua pegawai menjalankan pekerjaan sesuai dengan tanggungjawab nya masing-masing.					
6	Di instansi tempat saya bekerja, semua pegawai yang melanggar aturan akan di berikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.					

NO	Kesesuaian Kompensasi	STS	TS	N	S	SS
1	Kompensasi keuangan yang instansi berikan diukur sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah saya lakukan					
2	Instansi ini menciptakan kondisi sehingga diakui bahwa semua pegawainya memang menguasai pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya masing- masing					

3	Promosi di Instansi ini diberikan atas dasar prestasi kerja yang telah dicapai oleh para pegawai					
4	Instansi ini dikelola oleh manajemen sedemikian sehingga para pegawainya memulai dan menyelesaikan tugas pekerjaan dengan baik					
5	Di Instansi ini, penanggungjawab penyusunan laporan keuangan dapat memaksimalkan kemampuan, pengetahuan dan keahlian dibidangnya					
6	Di instansi ini gaji yang diberikan telah sesuai dengan tingkat pekerjaan yang saya lakukan sebagai pegawai pemerintah.					
7	Di instansi tempat saya bekerja, instansi selalu memberikan imbalan tunai dalam setiap kegiatan (kepanitiaan) yang berada di luar jam kerja.					
8	Di instansi tempat saya bekerja, bila pegawai bekerja melebihi waktu kerja (lembur) maka ada insentif tersendiri yang diberikan oleh instansi.					
9	Di instansi tempat saya bekerja, tunjangan pegawai yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan.					

Moralitas Individu

Petunjuk : Untuk menjawab nomor 1 sampai dengan nomor 6 di halaman berikutnya, Bapak/Ibu/Saudara/i akan diberikan kasus yang tidak terjadi sebenarnya. Berikan jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/i paling tepat.

KASUS

Tiga bulan yang lalu Amir Mandala, Ak pindah dari Dinas Perhubungan ke Dinas Pekerjaan Umum. Tetapi tetap sebagai staf akuntansi. Selama tiga tahun laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum diaudit oleh BPK. Hasil audit selalu memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selama tiga bulan bekerja di Dinas Pekerjaan Umum. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belum memperlihatkan keadaan yang sebenarnya. Masih terdapat beberapa program yang tidak jalan, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi batas anggaran tapi program pembangunan belum sepenuhnya berjalan.

Mengetahui hal ini, Amir Mandala, Ak menyampaikan permasalahan tersebut kepada pimpinanya. Namun pimpinanya meminta kepada Amir Mandala, Ak. untuk tidak mengubah proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang telah berjalan. Amir Mandala, Ak. diminta untuk menyelesaikan Laporan Realisasi Anggaran tersebut dengan tetap menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran telah digunakan dengan sebaik baiknya dan pembangunan telah dilakukan dengan semestinya. Pimpinan juga menyatakan akan memberikan bonus pada Amir Mandala, Ak. serta janji untuk dipromosikan.

Amir Mandala, Ak. Menyarankan agar pimpinanya mempertimbangkan untuk menunjukan gambaran kegiatan pembangunan yang telah tercapai, dan agar tidak terkena sanksi Undang-Undang, termasuk agar mempertimbangkan prinsip kesejahteraan masyarakat, serta tidak merugikan para pegawai lainnya.

Nilailah keputusan pimpinan tempat Bapak/Ibu/Saudara/i bekerja bila kondisi yang dihadapi oleh Amir Mandala, Ak. terjadi di SKPD tempat Bapak/Ibu/Saudara/i bekerja.

No	Moralitas Individu	STS	TS	N	S	SS
1	Pimpinan SKPD tetap menyelesaikan Laporan Realisasi Anggaran seperti periode yang lalu untuk kepentingannya.					
2	Pimpinan SKPD memberikan bonus pada staf akuntansinya karena patuh.					
3	Pimpinan SKPD tetap menyuruh staf akuntansinya untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti periode yang lalu agar kinerjanya bagus dan terlihat baik					
4	Pimpinan SKPD menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti periode yang lalu, karena sudah menjadi kelaziman di SKPD-nya.					
5	Pimpinan SKPD menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti yang sebenarnya, karena pimpinan takut terkena sanksi Undang-Undang.					
6	Pimpinan SKPD menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti kondisi yang sebenarnya demi mempertimbangkan prinsip kesejahteraan masyarakat serta tidak merugikan pemerintah.					

Lampiran 2

Rekapan Data

Rekap Data Variabel Kecenderungan Kecurangan

Responden	Dinas	Kecenderungan Fraud									Total Y
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	1	1	2	1	1	1	1	1	11
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	3	4	2	4	3	3	2	27
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	2	3	3	2	2	2	2	2	21
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	1	1	2	1	2	2	2	13
8	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	4	1	1	4	3	3	1	21
9	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	1	3	2	2	3	4	4	3	24
10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	2	2	1	1	4	2	1	17
11	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	1	1	2	2	1	1	1	1	12
13	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	4	2	1	2	3	2	4	22
14	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	2	2	2	2	2	2	2	2	17
15	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	2	2	2	3	2	2	19
16	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	1	1	1	2	2	1	1	13
17	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
18	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	2	1	1	1	1	2	1	2	12
19	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
20	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	2	1	1	1	1	2	1	2	12

46	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	2	2	3	3	2	3	21
47	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	3	2	2	2	2	2	19
48	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	3	3	3	2	2	4	3	3	26
49	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	2	2	2	3	2	2	19
50	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10
51	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
52	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	1	2	2	2	2	2	2	1	15
53	Pendidikan	2	4	4	3	4	3	4	3	2	29
54	Pendidikan	1	1	1	1	1	3	3	3	4	18
55	Pendidikan	2	2	1	2	3	3	3	2	3	21
56	Pendidikan	2	2	2	2	2	3	3	1	3	20
57	Pendidikan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
58	Pendidikan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
59	Pendidikan	3	3	3	2	3	2	3	2	3	24
60	Pendidikan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
61	Pendidikan	3	3	3	2	3	3	3	2	3	25
62	Pendidikan	3	3	3	2	3	2	3	2	3	24
63	Pendidikan	1	1	2	2	2	2	2	2	1	15
64	Pendidikan	4	2	4	1	1	2	5	2	3	24
65	Pendidikan	1	2	4	1	1	5	2	2	1	19
66	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
67	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	2	1	2	1	1	4	2	2	17
68	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
69	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	1	1	1	1	1	2	2	2	2	13
70	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	1	2	1	1	1	1	1	1	1	10
71	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
72	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	4	1	4	3	4	2	4	2	5	29
73	Perdagangan, Koprasi, dan	4	1	4	3	4	2	4	2	5	29

125	Perhubungan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
126	Perhubungan	2	2	2	3	2	3	3	2	3	22
127	Perhubungan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
128	Perhubungan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
129	Perhubungan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18

Rekap Data Variabel Asimetri Informasi

Responden	Dinas	Asimetri Informasi						Total X1
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	4	4	4	4	3	23
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	1	1	1	1	6
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	4	4	3	2	17
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	4	3	3	2	2	17
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	3	3	3	3	18
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	1	1	1	1	6
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	4	4	3	2	17
8	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	1	5	5	4	4	21
9	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	4	4	4	3	3	22
10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	4	4	4	4	3	22
11	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	4	4	4	4	4	24
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	3	3	2	2	3	15
13	Perindustrian dan tenaga Kerja	4	2	3	2	4	1	16
14	Perindustrian dan tenaga Kerja	3	3	3	3	3	3	18
15	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	4	4	4	3	19
16	Perindustrian dan tenaga Kerja	3	4	4	4	4	3	22
17	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	4	2	2	4	2	16
18	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	2	1	1	10

19	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	4	2	2	4	2	16
20	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	2	1	1	10
21	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	2	2	2	3	3	13
22	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	2	2	2	3	3	13
23	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	2	2	2	3	3	13
24	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	2	2	2	3	3	13
25	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	2	2	2	3	3	13
26	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	2	2	2	3	3	13
27	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	2	2	2	3	3	13
28	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	2	3	2	2	3	15
29	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	2	3	2	2	3	15
30	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	2	3	2	2	3	15
31	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	2	3	2	2	3	15
32	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	2	3	2	2	3	15
33	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	2	3	2	2	3	15
34	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	3	3	2	2	2	14
35	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	3	3	2	2	2	14
36	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	3	3	2	3	3	17
37	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4	4	4	4	4	4	24
38	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	3	3	3	4	3	19
39	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	3	3	3	4	3	18
40	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	2	2	2	2	2	13
41	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	2	2	2	12
42	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	4	4	4	4	4	4	24
43	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	1	1	1	2	2	9
44	Pertanian, Ketahanan Pangan	2	1	1	1	1	1	7

	dan Perikanan							
45	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	1	1	1	1	1	6
46	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	4	4	4	4	4	4	24
47	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	4	4	4	4	3	22
48	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	3	3	3	3	16
49	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	3	3	3	3	2	17
50	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	3	3	3	4	3	19
51	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	3	3	3	3	3	18
52	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	3	2	2	3	4	17
53	Pendidikan	4	4	4	4	2	3	21
54	Pendidikan	3	3	3	3	3	3	18
55	Pendidikan	3	3	3	3	3	3	18
56	Pendidikan	3	3	3	3	3	3	18
57	Pendidikan	3	3	3	3	3	3	18
58	Pendidikan	3	3	3	3	3	3	18
59	Pendidikan	3	3	3	3	3	3	18
60	Pendidikan	3	3	3	3	3	3	18
61	Pendidikan	3	3	3	3	3	3	18
62	Pendidikan	3	3	3	3	3	3	18
63	Pendidikan	3	3	3	3	4	3	19
64	Pendidikan	4	3	4	2	2	4	19
65	Pendidikan	2	1	5	5	4	4	21
66	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	1	1	1	1	1	1	6
67	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	3	2	2	2	1	1	11
68	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	4	4	4	3	4	4	23
69	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	2	2	2	2	2	12
70	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	2	2	2	2	2	12
71	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	3	2	2	2	2	13

72	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	2	2	4	5	4	19
73	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	2	2	4	5	4	19
74	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	4	4	4	3	3	3	21
75	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	4	4	5	3	4	4	24
76	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	4	4	3	3	3	3	20
77	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	2	2	4	4	5	19
78	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	2	2	3	4	4	17
79	Kesehatan	3	4	4	4	4	3	22
80	Kesehatan	3	4	4	5	3	3	22
81	Kesehatan	2	3	2	3	3	4	17
82	Kesehatan	3	3	4	4	4	5	23
83	Kesehatan	3	4	4	4	3	5	23
84	Kesehatan	2	3	3	3	4	4	19
85	Kesehatan	3	3	4	4	2	3	19
86	Kesehatan	2	3	3	1	4	5	18
87	Kesehatan	3	2	2	3	4	2	16
88	Kesehatan	3	3	2	4	2	1	15
89	Kesehatan	3	2	2	3	4	2	16
90	Kesehatan	2	2	3	4	4	4	19
91	Kependudukan dan Catatan Sipil	4	4	3	3	4	4	22
92	Kependudukan dan Catatan Sipil	4	4	3	3	4	4	22
93	Kependudukan dan Catatan Sipil	4	3	4	4	2	2	19
94	Kependudukan dan Catatan Sipil	4	4	4	4	4	4	24
95	Kependudukan dan Catatan Sipil	4	4	4	4	4	4	24
96	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	1	1	1	1	1	6
97	Kependudukan dan Catatan Sipil	4	4	3	3	4	4	22
98	Kependudukan dan Catatan Sipil	2	2	3	2	4	4	17

99	Kependudukan dan Catatan Sipil	2	2	2	2	2	2	12
100	Kependudukan dan Catatan Sipil	2	2	2	2	2	2	12
101	Kependudukan dan Catatan Sipil	4	4	4	3	4	4	23
102	Kependudukan dan Catatan Sipil	4	3	4	4	4	4	23
103	Kependudukan dan Catatan Sipil	4	4	3	3	4	4	22
104	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4	4	4	4	4	4	24
105	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4	4	4	3	3	3	21
106	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4	4	4	3	4	4	23
107	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	3	2	2	2	2	13
108	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	4	5	4	19
109	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4	4	4	3	2	2	19
110	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	1	1	1	1	6
111	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	1	1	1	1	6
112	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4	4	4	3	4	4	23
113	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4	4	3	3	4	4	22
114	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4	3	3	3	4	4	21
115	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4	3	4	2	2	4	19
116	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4	4	4	3	4	4	23
117	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4	3	4	2	4	4	21
118	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4	4	3	3	4	4	22
119	Perhubungan	2	2	2	4	5	4	19
120	Perhubungan	2	1	1	1	1	1	7
121	Perhubungan	2	1	1	1	2	2	9

122	Perhubungan	4	4	4	4	4	4	24
123	Perhubungan	3	2	2	2	2	2	13
124	Perhubungan	2	3	3	3	4	3	18
125	Perhubungan	3	3	3	3	4	3	19
126	Perhubungan	3	3	3	2	3	3	17
127	Perhubungan	4	4	4	4	4	4	24
128	Perhubungan	4	4	3	4	4	3	22
129	Perhubungan	4	2	2	2	3	4	17

Rekap Data Variabel Penegakan Hukum

Responden	Dinas	Penegakan Hukum						Total X2
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	4	4	4	4	2	20
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	2	1	2	2	1	9
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	2	1	2	2	2	10
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	3	3	4	3	2	17
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	4	4	3	3	3	20
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	2	1	5	1	1	11
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	2	4	2	2	2	13
8	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	1	1	2	1	9
9	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	2	1	2	2	2	10
10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	4	2	3	4	2	18
11	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	2	2	2	2	12
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	1	3	2	2	12
13	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	2	1	1	2	1	8
14	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	2	2	2	12
15	Perindustrian dan tenaga Kerja	3	3	2	2	1	2	13

16	Perindustrian dan tenaga Kerja	3	3	1	1	1	2	11
17	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	2	2	2	12
18	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	2	3	2	13
19	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	2	2	2	12
20	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	2	3	2	13
21	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	2	2	1	2	2	10
22	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	2	1	3	2	2	11
23	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	2	1	3	2	2	11
24	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	2	1	3	2	2	11
25	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	1	2	3	2	2	11
26	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	2	1	3	2	2	11
27	Perindustrian dan tenaga Kerja	1	2	1	3	2	2	11
28	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	1	2	2	1	2	10
29	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	1	2	1	2	2	10
30	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	2	2	2	2	2	12
31	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	2	1	2	2	2	11
32	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	2	1	2	2	2	11
33	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	2	2	2	2	1	11
34	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1	2	2	2	2	2	11
35	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1	2	2	2	2	2	11
36	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4	3	4	4	3	3	21
37	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	2	2	4	2	2	14
38	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	2	2	4	2	3	15
39	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	2	2	4	2	3	15
40	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	2	2	2	2	2	12
41	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	2	2	2	2	2	11
42	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	1	1	2	2	2	9

43	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	1	1	4	2	2	11
44	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	1	1	4	2	2	11
45	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	2	2	4	2	2	13
46	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	2	1	1	1	2	8
47	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	2	2	2	12
48	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	3	2	2	2	3	15
49	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	3	3	2	2	3	16
50	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	3	2	2	13
51	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	2	1	2	2	1	9
52	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	1	2	2	11
53	Pendidikan	2	1	1	3	2	1	10
54	Pendidikan	1	2	2	1	1	1	8
55	Pendidikan	3	3	3	2	3	3	17
56	Pendidikan	3	3	2	2	2	2	14
57	Pendidikan	3	3	3	2	2	2	15
58	Pendidikan	2	2	2	3	2	3	14
59	Pendidikan	1	2	1	2	2	1	9
60	Pendidikan	2	2	2	3	2	3	14
61	Pendidikan	1	2	1	2	2	1	9
62	Pendidikan	1	2	1	2	2	1	9
63	Pendidikan	2	2	2	3	2	2	13
64	Pendidikan	2	2	2	1	1	2	10
65	Pendidikan	4	2	1	1	1	2	11
66	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	2	2	3	3	2	14
67	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	1	2	2	1	1	2	9
68	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	2	2	2	2	2	12
69	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	2	2	3	2	2	13
70	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	1	1	1	1	1	1	6
71	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	1	1	1	1	1	1	6
72	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	1	2	2	2	2	1	10
73	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	1	2	2	2	2	1	10

74	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	1	1	1	4	3	2	12
75	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	3	3	1	2	2	3	14
76	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	4	5	3	3	2	19
77	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	1	1	3	3	2	3	13
78	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	1	2	2	2	2	11
79	Kesehatan	1	1	4	3	3	2	14
80	Kesehatan	3	2	1	3	3	2	14
81	Kesehatan	2	2	2	2	2	2	12
82	Kesehatan	1	1	3	3	4	3	15
83	Kesehatan	1	1	2	3	3	4	14
84	Kesehatan	1	4	3	2	2	2	14
85	Kesehatan	1	1	2	1	1	2	8
86	Kesehatan	2	3	4	4	3	3	19
87	Kesehatan	1	1	2	4	3	1	12
88	Kesehatan	2	1	3	2	3	2	13
89	Kesehatan	1	1	2	4	3	1	12
90	Kesehatan	1	1	1	1	1	2	7
91	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	2	2	2	2	2	11
92	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	2	2	2	2	2	11
93	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	1	2	2	2	2	10
94	Kependudukan dan Catatan Sipil	2	2	2	3	2	2	13
95	Kependudukan dan Catatan Sipil	2	2	2	3	2	2	13
96	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	1	1	1	1	1	6
97	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	2	2	2	2	1	10
98	Kependudukan dan Catatan Sipil	2	2	2	2	2	2	12
99	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	1	2	2	2	2	10
100	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	1	1	2	2	2	9
101	Kependudukan dan Catatan Sipil	2	1	2	1	1	2	9
102	Kependudukan dan Catatan Sipil	2	2	2	2	2	2	12

103	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	1	2	2	1	2	9
104	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	2	2	2	2	2	11
105	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	1	4	3	2	12
106	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	2	2	2	12
107	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	1	1	1	1	6
108	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	2	2	2	2	1	10
109	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	2	1	2	2	2	10
110	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	2	2	3	3	2	13
111	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3	3	3	3	3	2	17
112	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	2	2	2	12
113	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	2	2	2	2	10
114	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	3	3	2	2	12
115	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	1	1	2	10
116	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	1	2	2	1	2	10
117	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	1	1	1	1	6
118	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	1	1	1	2	9
119	Perhubungan	1	2	2	2	2	1	10
120	Perhubungan	1	1	1	4	2	2	11
121	Perhubungan	1	1	1	4	2	2	11
122	Perhubungan	1	1	1	2	2	2	9
123	Perhubungan	2	2	2	2	2	2	12
124	Perhubungan	2	2	2	4	2	3	15
125	Perhubungan	2	2	2	4	2	3	15
126	Perhubungan	5	4	3	4	4	3	23
127	Perhubungan	2	2	2	4	2	2	14
128	Perhubungan	1	1	2	2	2	1	9

129	Perhubungan	1	1	2	2	1	1	8
-----	-------------	---	---	---	---	---	---	---

Rekap Data Variabel Kesesuaian Kompensasi

Responden	Dinas	Kesesuaian Kompensasi									
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	Total X3
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	4	2	4	4	4	4	4	30
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	1	1	2	2	2	5	4	2	22
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	3	2	2	3	3	3	2	4	24
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	3	3	3	3	3	2	3	26
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	2	2	2	2	2	2	2	2	17
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	1	2	2	2	2	2	2	15
8	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	2	1	1	2	2	2	1	13
9	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	1	2	2	2	3	2	3	19
10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	4	1	2	2	2	2	2	21
11	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	2	2	2	3	3	3	3	22
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	2	2	2	4	5	5	3	27
13	Perindustrian dan tenaga Kerja	3	2	1	2	1	3	3	1	2	18
14	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	2	2	2	3	3	2	20
15	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	3	2	2	3	3	4	23
16	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	3	3	2	4	4	3	25
17	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	2	2	2	4	4	2	22
18	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	1	3	2	2	3	3	3	2	21
19	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	2	2	2	3	3	2	20
20	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	1	3	2	2	3	3	3	2	21
21	Perindustrian dan tenaga Kerja	3	3	2	2	2	3	2	3	4	24
22	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	3	3	2	2	3	2	3	4	24

23	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	3	3	2	2	3	2	3	4	24
24	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	3	3	2	2	3	2	3	4	24
25	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	3	3	2	2	3	2	3	4	24
26	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	3	3	2	2	3	2	3	4	24
27	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	3	3	2	2	3	2	3	4	24
28	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1	2	1	2	1	2	2	3	4	18
29	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1	2	1	2	2	2	2	3	4	19
30	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	2	2	2	2	2	2	3	4	21
31	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	2	2	2	2	2	2	3	4	22
32	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	2	2	2	2	2	2	3	4	22
33	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	2	2	2	2	2	2	3	4	21
34	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	2	1	2	2	1	1	2	3	17
35	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	2	1	2	2	1	1	2	3	17
36	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4	3	4	3	4	3	4	3	3	31
37	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	2	2	2	2	2	4	4	3	23
38	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4	4	4	3	4	4	4	3	4	34
39	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4	4	4	3	4	4	4	3	4	34
40	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	3	2	2	2	2	3	3	2	22
41	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	2	3	2	3	2	4	4	2	25
42	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	1	1	1	2	3	2	4	18
43	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	4	4	2	2	2	4	4	4	4	30
44	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	4	4	2	2	2	4	4	4	4	30
45	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	4	4	4	2	2	2	4	2	4	28
46	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	1	1	1	2	3	2	2	16

47	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	2	2	2	3	2	2	19
48	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	2	3	2	2	3	3	3	3	24
49	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	3	3	2	3	3	3	3	3	26
50	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	4	3	3	3	3	3	4	3	3	29
51	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	1	2	2	2	4	1	3	19
52	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	2	3	2	3	3	3	22
53	Pendidikan	2	2	3	2	2	2	3	4	1	21
54	Pendidikan	3	2	3	1	2	2	3	3	2	21
55	Pendidikan	3	2	2	2	3	3	2	2	3	22
56	Pendidikan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
57	Pendidikan	3	2	2	2	2	3	3	3	3	23
58	Pendidikan	3	3	3	3	2	3	2	2	2	23
59	Pendidikan	2	2	1	2	2	2	2	1	3	17
60	Pendidikan	3	3	3	3	2	3	2	2	2	23
61	Pendidikan	2	2	1	2	2	2	4	1	3	19
62	Pendidikan	2	2	1	2	2	2	4	1	3	19
63	Pendidikan	4	3	3	3	3	3	4	3	3	29
64	Pendidikan	2	2	4	2	2	3	2	2	2	21
65	Pendidikan	1	1	1	1	1	2	2	2	1	12
66	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	2	2	2	2	3	4	4	2	23
67	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	1	1	2	2	1	2	2	2	1	14
68	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	2	2	2	2	3	3	2	2	20
69	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	3	3	3	3	2	3	3	3	3	26
70	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	1	1	1	1	1	1	4	3	4	17
71	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	1	2	1	1	1	3	3	1	4	17
72	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	1	2	2	2	2	2	4	4	2	21
73	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	1	2	2	2	2	2	2	2	2	17
74	Perdagangan, Koprasi, dan	3	3	3	3	2	2	3	3	3	25

	Sipil										
102	Kependudukan dan Catatan Sipil	3	2	2	3	2	2	3	3	4	24
103	Kependudukan dan Catatan Sipil	2	2	2	2	2	2	3	3	3	21
104	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	2	2	2	3	3	3	21
105	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3	3	3	3	2	2	3	3	3	25
106	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	2	2	3	3	2	2	20
107	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	2	1	1	1	3	3	5	4	21
108	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	2	2	2	2	2	4	4	2	21
109	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	1	2	2	3	3	2	3	20
110	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	2	2	2	4	4	2	22
111	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	2	2	3	4	4	2	23
112	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	2	2	3	3	2	2	20
113	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	1	2	3	3	2	2	19
114	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3	2	2	1	3	3	3	2	2	21
115	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	4	2	3	2	2	2	21
116	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	2	3	2	2	2	2	19
117	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
118	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	1	2	2	1	2	2	2	14
119	Perhubungan	1	2	2	2	2	2	4	4	2	21
120	Perhubungan	4	4	2	2	2	4	4	4	4	30
121	Perhubungan	4	4	2	2	2	4	4	4	4	30
122	Perhubungan	2	2	1	1	1	2	3	4	4	20
123	Perhubungan	3	2	2	2	2	2	3	3	2	21
124	Perhubungan	4	4	4	3	4	4	4	3	4	34
125	Perhubungan	4	4	4	3	4	4	4	3	4	34
126	Perhubungan	4	3	4	3	4	3	4	3	3	31

127	Perhubungan	2	2	2	2	2	2	4	4	3	23
128	Perhubungan	2	2	2	2	2	2	3	4	3	22
129	Perhubungan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18

Rekap Data Variabel Moralitas Individu

Responden	Dinas	Moralitas Individu						Total X4
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	3	3	3	3	16
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	2	4	3	4	2	16
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	2	1	1	1	7
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	4	3	3	2	2	17
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	3	3	3	2	17
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	1	1	1	1	6
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	1	1	2	2	8
8	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	2	2	1	1	10
9	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	4	1	3	1	15
10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	1	2	2	1	1	9
11	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	2	2	2	2	12
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	1	2	2	1	1	9
13	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	2	2	2	12
14	Perindustrian dan tenaga Kerja	4	3	3	3	3	3	19
15	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	2	2	2	12
16	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	4	2	4	4	18
17	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	2	2	2	12
18	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	1	2	1	1	9
19	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	1	2	1	2	3	11
20	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	1	2	1	1	9

21	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	2	2	2	2	1	11
22	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	3	3	3	2	1	14
23	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	3	3	3	2	1	14
24	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	3	3	3	2	1	14
25	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	3	3	3	2	2	15
26	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	3	3	3	2	2	15
27	Perindustrian dan tenaga Kerja	2	3	3	3	2	2	15
28	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	2	3	2	2	1	13
29	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	3	2	3	1	2	13
30	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	2	2	2	1	1	10
31	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	3	3	3	2	1	14
32	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	2	3	2	2	1	13
33	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	2	3	2	2	2	14
34	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	2	2	2	2	3	13
35	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	2	2	2	2	3	13
36	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1	2	2	2	1	1	9
37	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	2	2	2	2	2	12
38	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	2	2	2	2	2	12
39	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1	1	1	1	2	2	8
40	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2	2	2	2	2	1	11
41	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	2	4	4	16
42	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	1	1	1	1	1	7
43	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	1	1	1	1	1	6
44	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	1	2	2	2	1	9
45	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	2	2	2	12

46	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	2	2	2	12
47	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	3	3	3	2	2	16
48	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	3	2	2	13
49	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	3	2	2	13
50	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	2	2	2	12
51	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	4	4	2	2	2	1	15
52	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	3	2	2	13
53	Pendidikan	2	2	4	4	3	1	16
54	Pendidikan	4	2	5	3	1	1	16
55	Pendidikan	3	2	3	3	3	3	17
56	Pendidikan	3	4	3	3	3	3	19
57	Pendidikan	2	1	2	2	2	1	10
58	Pendidikan	4	2	2	2	2	2	14
59	Pendidikan	4	4	2	2	2	1	15
60	Pendidikan	4	4	2	2	2	1	15
61	Pendidikan	4	4	2	2	2	1	15
62	Pendidikan	4	4	2	2	2	1	15
63	Pendidikan	2	2	2	2	2	2	12
64	Pendidikan	2	3	4	4	2	2	17
65	Pendidikan	4	4	4	4	2	1	19
66	Perdagangan, Koperasi, dan UKM	1	2	2	1	1	1	8
67	Perdagangan, Koperasi, dan UKM	4	4	4	4	2	2	20
68	Perdagangan, Koperasi, dan UKM	2	2	2	2	2	2	12
69	Perdagangan, Koperasi, dan UKM	2	2	2	2	2	2	12
70	Perdagangan, Koperasi, dan UKM	2	2	1	1	2	2	10
71	Perdagangan, Koperasi, dan UKM	2	2	2	2	1	1	10
72	Perdagangan, Koperasi, dan UKM	1	2	4	4	1	1	13
73	Perdagangan, Koperasi, dan	1	2	4	4	1	1	13

	UKM							
74	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	2	2	2	1	1	10
75	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	3	3	3	5	2	18
76	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	3	3	3	2	3	2	16
77	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	3	2	3	3	3	16
78	Perdagangan, Koprasi, dan UKM	2	2	2	2	2	2	12
79	Kesehatan	2	3	2	2	4	1	14
80	Kesehatan	2	2	3	4	2	4	17
81	Kesehatan	2	1	2	3	3	2	13
82	Kesehatan	2	2	3	3	3	2	15
83	Kesehatan	3	3	2	4	2	3	17
84	Kesehatan	2	3	2	2	3	2	14
85	Kesehatan	3	3	4	2	1	2	15
86	Kesehatan	3	3	4	5	4	2	21
87	Kesehatan	3	3	4	2	1	1	14
88	Kesehatan	3	3	2	4	4	5	21
89	Kesehatan	3	3	4	2	1	1	14
90	Kesehatan	2	3	3	2	2	1	13
91	Kependudukan dan Catatan Sipil	2	2	2	3	2	1	12
92	Kependudukan dan Catatan Sipil	2	2	2	3	4	4	17
93	Kependudukan dan Catatan Sipil	2	2	1	1	2	2	10
94	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	2	1	1	2	1	8
95	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	1	1	1	1	1	6
96	Kependudukan dan Catatan Sipil	2	1	2	2	2	1	10
97	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	1	2	2	2	2	10
98	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	1	1	1	2	2	8
99	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	1	1	1	1	1	6
100	Kependudukan dan Catatan	2	2	2	1	2	1	10

	Sipil							
101	Kependudukan dan Catatan Sipil	2	2	2	2	2	1	11
102	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	1	2	2	2	2	10
103	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	1	1	1	1	2	7
104	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	3	2	2	2	1	12
105	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	2	1	1	10
106	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	2	2	2	12
107	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	1	1	1	2	2	9
108	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	2	4	4	1	1	13
109	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3	2	2	2	1	1	11
110	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	2	2	1	1	1	8
111	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	2	2	1	1	1	8
112	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	2	2	2	12
113	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	2	2	1	11
114	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	1	2	1	1	7
115	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	1	1	1	1	6
116	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	1	2	2	11
117	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	2	2	2	2	12
118	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	2	1	1	2	1	8
119	Perhubungan	1	2	4	4	1	1	13
120	Perhubungan	1	1	2	2	2	1	9
121	Perhubungan	1	1	1	1	1	1	6
122	Perhubungan	2	1	1	1	1	1	7
123	Perhubungan	2	2	2	2	2	1	11
124	Perhubungan	1	1	1	1	2	2	8

125	Perhubungan	2	2	2	2	2	2	12
126	Perhubungan	1	2	2	2	1	1	9
127	Perhubungan	2	2	2	2	2	2	12
128	Perhubungan	2	2	2	2	2	2	12
129	Perhubungan	2	2	2	2	2	2	12

Lampiran 3

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kecenderungan Fraud	129	8	30	17.10	5.330
Asimetri Informasi	129	6	24	17.30	4.839
Penegakan Hukum	129	6	23	11.80	3.032
Kesesuaian Kompensasi	129	9	36	22.21	4.789
Moralitas Individu	129	6	21	12.20	3.437
Valid N (Listwise)	129				

Sumber: Hasil Olah Primer 2018

	N	129	129	129	129	129	129	129
X1.3	Pearson Correlation	.680**	.666**	1	.716**	.495**	.580**	.854**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	129	129	129	129	129	129	129
X1.4	Pearson Correlation	.468**	.527**	.716**	1	.659**	.540**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	129	129	129	129	129	129	129
X1.5	Pearson Correlation	.380**	.501**	.495**	.659**	1	.740**	.789**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	129	129	129	129	129	129	129
X1.6	Pearson Correlation	.451**	.492**	.580**	.540**	.740**	1	.793**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	129	129	129	129	129	129	129
TOTAL_X1	Pearson Correlation	.767**	.811**	.854**	.811**	.789**	.793**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	129	129	129	129	129	129	129

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Penegakan Hukum

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.597**	.321**	.074	.238**	.435**	.650**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.404	.007	.000	.000
	N	129	129	129	129	129	129	129
X2.2	Pearson Correlation	.597**	1	.433**	.119	.353**	.270**	.683**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.180	.000	.002	.000
	N	129	129	129	129	129	129	129
X2.3	Pearson Correlation	.321**	.433**	1	.219	.459**	.380**	.700**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.013	.000	.000	.000
	N	129	129	129	129	129	129	129
X2.4	Pearson Correlation	.074	.119	.219	1	.550**	.326**	.608**
	Sig. (2-tailed)	.404	.180	.013		.000	.000	.000
	N	129	129	129	129	129	129	129
X2.5	Pearson Correlation	.238**	.353**	.459**	.550**	1	.323**	.727**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.000	.000		.000	.000
	N	129	129	129	129	129	129	129
X2.6	Pearson Correlation	.435**	.270**	.380**	.326**	.323**	1	.648**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000	.000		.000

X3.4	Pearson Correlation	.424**	.445*	.455**	1	.562*	.215	.191	.132	.122	.584**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.014	.030	.137	.168	.000
	N	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
X3.5	Pearson Correlation	.523**	.374*	.503**	.562**	1	.399*	.322**	.168	.149	.679**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.056	.093	.000
	N	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
X3.6	Pearson Correlation	.462**	.543*	.373**	.215*	.399*	1	.392**	.253*	.365*	.689**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.014	.000		.000	.004	.000	.000
	N	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
X3.7	Pearson Correlation	.321**	.275*	.196	.191	.322*	.392*	1	.527*	.170	.595**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.026	.030	.000	.000		.000	.054	.000
	N	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
X3.8	Pearson Correlation	.140	.238*	.206	.132	.168	.253*	.527**	1	.297*	.524**
	Sig. (2-tailed)	.114	.007	.019	.137	.056	.004	.000		.001	.000
	N	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
X3.9	Pearson Correlation	.314**	.522*	.079	.122	.149	.365*	.170	.297*	1	.529**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.374	.168	.093	.000	.054	.001		.000
	N	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
TOTAL_X3	Pearson Correlation	.745**	.788*	.666**	.584**	.679*	.689*	.595**	.524*	.529*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

X4.6	Pearson Correlation	.138	.082	.066	.266**	.591**	1	.510**
	Sig. (2-tailed)	.118	.357	.458	.002	.000		.000
	N	129	129	129	129	129	129	129
TOTAL_X4	Pearson Correlation	.680**	.750**	.725**	.768**	.654**	.510**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	129	129	129	129	129	129	129

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 5

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kecenderungan Kecurangan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.776	10

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Asimetri Informasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.800	7

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penegakan Hukum

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.763	7

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesesuaian Kompensasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.758	10

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Moralitas Individu

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.771	7

Lampiran 6

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		129
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	4.57992220
	Absolute	.082
Most Extreme Differences	Positive	.082
	Negative	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z		.929
Asymp. Sig. (2-tailed)		.353

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 7
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	4.906	2.861		1.715	.089		
1 TOTAL_X1	.266	.088	.241	3.022	.003	.935	1.070
TOTAL_X2	-.011	.161	-.006	-.068	.946	.706	1.417
TOTAL_X3	-.006	.102	-.005	-.057	.954	.710	1.408
TOTAL_X4	.640	.122	.413	5.232	.000	.958	1.044

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Lampiran 8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.084	1.765		.048	.962		
Asimetri Informasi	.050	.054	.084	.927	.356	.935	1.070
Penegakan Hukum	-.096	.100	-.100	-.967	.336	.706	1.417
Kesesuaian Kompensasi	.076	.063	.125	1.205	.230	.710	1.408
Moralitas Individu	.165	.075	.195	2.185	.031	.958	1.044

a. Dependent Variable: RES2

Lampiran 9
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	4.906	2.861			
1	Asimetri Informasi	.266	.088	.241	3.022	.003
	Penegakan Hukum	-.011	.161	-.006	-.068	.946
	Kesesuaian Kompensasi	-.006	.102	-.005	-.057	.954
	Moralitas Individu	-.640	.122	.413	5.232	.000

a. Dependent Variable: Kecenderungan Fraud

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Penegakan Hukum ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kecenderungan Fraud

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.511 ^a	.262	.238	4.653

a. Predictors: (Constant), Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Penegakan Hukum

b. Dependent Variable: Kecenderungan Fraud

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	950.802	4	237.700	10.978	.000 ^b
Residual	2684.888	124	21.652		
Total	3635.690	128			

a. Dependent Variable: Kecenderungan Fraud

b. Predictors: (Constant), Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Penegakan Hukum